



Universitas Udayana



Pemerintah Kota Denpasar



PROFIL ANAK KOTA DENPASAR TAHUN 2015

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kota Denpasar
Bekerja sama dengan
Pusat Studi Wanita dan Pelindungan Anak
Universitas Udayana

PROFIL ANAK KOTA DENPASAR
TAHUN 2015

**PROFIL ANAK KOTA DENPASAR
TAHUN 2015**

Penulis
Ni Luh Arjani
Th. Handayani

Tata Letak
Slamat Trisila

Penerbit
CAKRA PRESS
Anggota IKAPI Bali
Jalan Diponegoro No. 256
Denpasar, Bali 80114
E-mail: cakrapress@yahoo.com

**Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kota Denpasar**
Bekerja sama dengan
**Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak
Universitas Udayana**

Cetakan Pertama: 2015

ISBN 978-602-9320-54-1



**Kementerian
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia**

1398 978-602-7320-04-1



9 786029 320541

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
<i>Executif summary</i>	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar/Foto	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Manfaat	6
1.4 Jenis dan Sumber Data	7
1.5 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	8
1.6 Ruang	8
BAB II DEFINISI KONSEP DAN LANDASAN HUKUM	11
2.1 Definisi Konsep	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Pengertian Kesejahteraan Anak	12
2.1.3 Pengertian Perlindungan Anak	13
2.2 Landasan Hukum	14
2.2.1 Undang-Undang Perlindungan Anak	14
2.2.2 Konvensi Hak-Hak Anak	16
2.2.3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.2 Th 2009 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	17
2.2.4 Perda Kota Denpasar No 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	18
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	19
3.1 Visi dan Misi Kota Denpasar	19
3.2 Penjelasan Lambang	19
3.3 Letak Geografi	21
3.4 Kondisi Demografi	23
3.4.1 Penduduk menurut Jenis Kelamin	24

3.5	Pemerintahan	27
3.6	Sarana dan Prasarana Umum	28
BAB IV PROFIL ANAK KOTA DENPASAR		32
4.1	Hak-Hak Sipil dan Kebebasan	34
4.1.1	Penduduk Usia Anak di Kota Denpasar	34
4.1.2	Kepemilikan Akte Kelahiran	39
4.1.3	Fasilitas Informasi Layak Anak	39
4.1.4	Organisasi Anak/Kelompok bermain	40
4.2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	47
4.2.1	Anak Menikah di bawah Usia 18 tahun	48
4.2.2	Lembaga Konsultasi Keluarga i.	50
4.2.3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	54
4.3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	55
4.3.1	Jumlah Kelahiran	55
4.3.2	Kematian Bayi dan Balita	57
4.3.3	Pembelian Asi Eksklusif	60
4.3.4	Status Gizi Balita	63
4.3.5	Pojok Asi	65
4.3.6	Imunisasi	66
4.3.7	Lembaga Penyediaan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Mental	68
4.3.8	Jumlah Keluarga Miskin	70
4.4	Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	71
4.4.1	Angka Partisipasi Kasar	72
4.4.1.1	Angka Partisipasi Kasar Tingkat TK, SD,SMP dan SMA	73
4.4.2	Angka Partisipasi Murni	75
4.4.2.1	Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, SMP, dan SMA	75
4.4.3	Siswa Mengulang Kelas	76
4.4.4	Siswa Putus Sekolah (Drop Out)	79
4.4.5	Jumlah Siswa	79
4.4.5.1	Jumlah Siswa TK	83
4.4.5.2	Jumlah Siswa SD	84
4.4.5.3	Jumlah Siswa SMP	85
4.4.5.4	Jumlah Siswa SMA dan SMK	87

4.4.6	Siswa Melanjutkan Sekolah	88
4.4.6.1	Siswa Melanjutkan SMP	89
4.4.6.2	Siswa Melanjutkan SMA	91
4.4.6.3	Siswa Melanjutkan SMK	92
4.4.7	Jumlah Sekolah	93
4.4.8	Kegiatan Budaya	95
4.5	Upaya Perlindungan Khusus	99
4.5.1	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100
4.5.2	Anak Berkebutuhan Khusus	105
4.5.3	Panti Asuhan	107
4.5.4	Anak Terlantar	119
4.5.5	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	110
BAB V PENUTUP		113
5.1	Simpulan	113
5.2	Rekomendasi	115
Daftar Pustaka		117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2012 dan 2013
Tabel 3.2	Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar/Lingkungan per Kecamatan Dirinci menurut Dinas dan Adat Tahun 2013
Tabel 4.1	Penduduk Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, 2013
Tabel 4.2	Anak (0 -18 tahun) yang Memiliki Kutipan Akta kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2012
Tabel 4.3	Fasilitas Informasi Layak Anak Kota Denpasar Tahun 2010/2011 dan 2012/2013
Tabel 4.4	Forum Anak di Kota Denpasar, tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.5	Jumlah Kelompok Bermain/TK di Kota Denpasar Tahun 2013
Tabel 4.6	Jumlah Siswa Taman Kanak – Kanak menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2013
Tabel 4.7	Lembaga Konsultasi Anak di Kota Denpasar , Tahun 2013
Tabel 4.8	Jumlah Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2011- 2013
Tabel 4.9	Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kota Denpasar Tahun 2013
Tabel 4.10	Persentase cakupan ASI Eksklusif berdasarkan kecamatan Tahun 2013
Tabel 4.11	Status Gizi Balita menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas Kota Denpasar Tahun 2013
Tabel 4.12	Pojok Asi di Kota Denpasar Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.13	Persentase Imunisasi pada Balita di Kota Denpasar Tahun 2011- 2013
Tabel 4.14	Lembaga Penyediaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental di Denpasar Tahun 2011 - 2013
Tabel 4.15	Jumlah Keluarga Miskin, Tahun 2012-2013
Tabel 4.16	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2011 dan 2012
Tabel 4.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMA menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.20	Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD, menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.21	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP, menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.22	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA, menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.23	Jumlah Siswa Mengulang menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2013
Tabel 4.24	Jumlah siswa SD Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.25	Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.25a	Jumlah Siswa SMA Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.26	Jumlah Siswa Taman Kanak – Kanak menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.27	Jumlah Siswa SD berdasarkan Jenis kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.28	Jumlah Siswa SMP berdasarkan Jenis kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012 dan

	2013
Tabel 4.29	Jumlah Siswa SMA berdasarkan Jenis kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.30	Jumlah Siswa SMK berdasarkan Jenis kelamin di Kota Denpasar, tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.31	Angka Siswa Melanjutkan ke SMP menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.32	Persentase Siswa Melanjutkan ke SMA menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.33	Persentase Siswa Melanjutkan ke SMK menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.34	Jumlah Sekolah di Kota Denpasar, 2012 dan 2013
Tabel 4.35	Jumlah Fasilitas Kreatif dan Rekreatif Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.36	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tahun 2012 dan 2013
Tabel 4.37	Anak sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan, 2012 dan 2013
Tabel 4.38	Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2012 dan 2013
Tabel 3.39	Data Anak Berkebutuhan Khusus di PTKABK Kota Denpasar Per 30 April 2013
Tabel 4.40	Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Menurut Kecamatan dan Kategori Terlantar Kota Denpasar Tahun 2012-2013
Tabel 4.41	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang Telah Dibina di Kota Denpasar, 2012 dan 2013

DAFTAR GAMBAR/FOTO

- Gambar: 3.1 Lambang Kota Denpasar
Gambar: 3.2 Peta Kota Denpasar
Gambar: 3.3 Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Kecamatan, Th. 2014
Gambar: 3.4 Sekolah PAUD di Kota Denpasar
Gambar: 3.5 Sekolah PAUD di Kota Denpasar
Gambar: 3.6 Arena bermain Anak di Lapangan Puputan Badung dan di Pusat Perbelanjaan di Kota Denpasar
- Gambar: 4.1 Komposisi Kepemilikan Akte Kelahiran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2012
Gambar: 4.2 Anak PAUD dalam komunitasnya.
Gambar: 4.3 Anak-anak TK di Lingkungan Sekolahnya
Gambar: 4.4 Pentas Budaya Anak TK Kota Denpasar
Gambar: 4.5 Persentase Murid Taman Kanak-Kanak menurut Jenis Kelamin di Denpasar Tahun 2013.
Gambar: 4.6 Anak yang Menikah di bawah Usia 18 tahun, pada tahun 2013.
Gambar: 4.7 Persentase Kelahiran Menurut jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2011, 2012 dan 2013
Gambar: 4.8 Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2012 dan 2013
Gambar: 4.9 Cakupan ASI Eksklusif Di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2013
Gambar: 4.10 Status Gizi Balita di Kota Denpasar Tahun 2013
Gambar: 4.11 Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2013
Gambar : 4.12 Persentase Angka Partisipasi Murni SMA dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2013
- Gambar: 4.13 Jumlah Siswa Mengulang Kelas menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2013
Gambar: 4.14 Persentase Siswa SD- SMA/SMK Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2013
Gambar: 4.15 Bapak Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar menyerahkan Hadiah kepada Anak-anak berkebutuhan khusus pemenang lomba dalam rangka HUT Kota Denpasar
- Gambar: 4.16 Ketua Tim Penggerak PKK berdialog dengan Anak Berkebutuhan Khusus.
Gambar: 4.17 Anak-anak Berkebutuhan Khusus menyanyi bersama
Gambar: 4.18 Jumlah Anak Asuh dan Panti Asuhan di Kota Denpasar Tahun 2012 dan 2013
Foto : 4.1 Pentas Budaya Anak-anak Kota Denpasar.
Foto : 4.2 Pentas *Dance* anak-anak Kota Denpasar
Foto : 4.3 Aktivitas anak-anak dalam pengembangan budaya Bali di Kota Denpasar.
Foto : 4.4 Lomba pakaian adat Bali Anak-anak Kota Denpasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini persoalan anak dan remaja di masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan masih cukup marak. Secara umum permasalahan anak yang muncul khususnya di wilayah perkotaan sangat kompleks seperti kenakalan remaja, perkosaan, pelecehan seksual, trafficking, perdagangan anak, dan lain-lain. Hal ini terjadi tentu tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat baik yang dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap permasalahan anak tidak mau tinggal diam membiarkan persoalan ini berkembang semakin parah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah seperti program Kabupaten/kota layak anak, lomba-lomba BKB, BKR, P2WKSS, dan berbagai program lainnya.

Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesejahteraannya. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib masa depan negara kita. Terkait dengan hal ini lembaga khusus yang menangani masalah anak seperti Kementerian Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) bersinergi dengan lembaga lain yang berkopeten dalam mengimplementasikan program-program yang terkait anak.

Di Indonesia persoalan anak tampaknya masih menjadi isu sentral karena sampai saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 17,7 Juta (Kompas, 23 Februari 2010). Anak-anak yang berada di dalam situasi sulit ini meliputi juga anak-anak yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini kemampuan negara untuk mengatasinya hanya 4% setahun atau lebih kurang 708.000 anak, ini artinya negara baru mampu menyelesaikan masalah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini selama 25 tahun atau seperempat abad ke depan (<http://politik.kompasiana.com>)

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan anak masih memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif. Hal ini mengingatkan bahwa Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus Bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak azasi anak. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hak-hak anak, karena anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumberdaya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumberdaya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak. Anak sebagai karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat

sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (KNPP, 2002, 9).

Untuk melindungi anak dari berbagai perlakuan kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah sudah mengeluarkan berbagai payung hukum yang tertuang baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam bentuk Undang-undang lainnya seperti dalam Undang-undang HAM serta UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak. Di samping itu Konvensi Hak-hak Anak (KHA) juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya terwujudnya hak anak Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO 138 tentang batasan usia minimum untuk bekerja dan Konvensi ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak. Indonesia juga telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Namun kenyataannya tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15 tahun baik di sektor formal maupun informal masih tetap ada.

Namun demikian, kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak juga masih kerap mewarnai kehidupan anak baik di masyarakat Bali umumnya maupun di Kota Denpasar. Jumlah anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi masih relatif besar. Masih ada anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan, belum mendapatkan pelayanan yang optimal, putus sekolah, menjadi korban trafficking, fedofilia, penganiayaan dan lain-lain. Kondisi yang demikian ini mencerminkan masih kurangnya kesadaran dan kepekaan para perencana dan penentu kebijakan untuk memprioritaskan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk menekan terjadinya kasus-kasus yang menimpa anak-anak, maka peran aktif daerah menjadi strategis untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Untuk itu, salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah Kota Denpasar adalah menjadikan Denpasar sebagai kota layak anak dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana **pendukungnya. Untuk dapat mengambil satu kebijakan dan program yang berkaitan dengan program kota layak anak diperlukan masukan data dasar** ataupun data estimasi/proyeksi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.. Data ini nantinya akan dijadikan dasar kesepakatan dari para pemangku kepentingan baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam melaksanakan aksi kongkrit pembangunan kota Denpasar menuju kota layak anak yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak.

Secara umum permasalahan anak yang masih cukup menonjol antara lain adalah: **pertama**; masih belum semua anak mempunyai akte kelahiran, **kedua**; masih belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, **ketiga**; masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; **keempat**; masih belum semua anak mempunyai kesehatan yang optimal; **kelima**, masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus.

Belakangan ini, ketersediaan data mengenai permasalahan anak yang ada di Kota Denpasar sudah tertuang dalam buku profil anak yang telah diterbitkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Data yang ada dalam buku ini memuat data anak yang cukup komprehensif sehingga akan sangat membantu para penentu kebijakan dalam menyusun program-program yang cocok/sesuai untuk mengatasi masalah kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA)

terutama dalam menunjang pencaangan Denpasar Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian, mengingat fenomena sosial terkait anak selalu mengalami perubahan, maka data yang ada dalam buku ini perlu di *up date* sehingga data yang ada di dalamnya selalu data yang terbaru. Data ini selanjutnya akan dipakai pedoman untuk menyusun program-program berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan Profil Anak Kota Denpasar penting dilakukan secara kontinu guna memperoleh data yang selalu *up to date*.

Jika suatu program/kegiatan pembangunan dibuat tanpa dilandasi oleh data kongkrit dan terbaru, maka ada kecenderungan hasil yang diperoleh tidak maksimal karena bisa jadi antara permasalahan yang ada dengan program yang dilaksanakan menjadi tidak nyambung sehingga program yang dibuat menjadi mubasir. Oleh karena itu keberadaan data yang terbaru sebagai pondasi dalam menyusun kebijakan/program dan kegiatan menjadi sangat penting. Untuk mempermudah mengidentifikasi isu-isu yang terkait dengan anak, maka data anak dirangkum secara komprehensif dalam buku Profil anak Kota Denpasar.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku Profil Anak Kota Denpasar adalah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat terkait dengan persoalan anak di Kota Denpasar. Data yang ada di dalam buku ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun kegiatan terkait dengan pencaangan Denpasar sebagai kota layak anak. Secara keseluruhan buku ini memuat hak-hak anak yang terdiri dari lima (5) klaster yakni.

- a. Hak-hak Sipil dan Kebebasan
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya

e. Upaya-upaya Perlindungan Khusus bagi Anak

1.3 Manfaat

Seperti telah disinggung di atas bahwa dalam menyusun suatu kebijakan/program/kegiatan pembangunan keberadaan data menjadi hal yang sangat penting guna mendapatkan hasil pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, tersusunnya buku profil anak Kota Denpasar diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar secara umum dan khususnya dalam mewujudkan kota layak anak. Manfaat yang ini antara lain adalah sebagai:

- a. Dasar dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan di Kota Denpasar khususnya pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak
- b. Bahan informasi untuk sarana diskusi dan analisis masalah dalam berbagai kegiatan pembangunan Kota Denpasar yang akan dicanangkan sebagai kota layak anak.
- c. Bahan informasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi tentang keberhasilan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan pencanangan Denpasar sebagai kota layak anak.
- d. Bahan masukan bagi para perencana terutama dalam menyusun program yang berkaitan dengan pembangunan Kota Denpasar sebagai kota layak anak.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipublikasikan dalam buku profil anak Kota Denpasar ini adalah data kuantitatif yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data ini sebagian besar diperoleh dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang menyediakan data berkaitan dengan anak. Sumber dimaksud antara lain adalah Badan Pusat

Statistik (BPS), Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial,(Disnakertransos), Dinas Kesehatan, Badan KBPP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata,Dinas Catatan Sipil, Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati masalah anak, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain.

Data sekunder yang digali dari sumber-sumber ini adalah data yang berkaitan dengan lima cluster yaitu: (1) data mengenai Hak-hak Sipil dan Kebebasan, (2) data mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) data tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) data mengenai Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan (5) data yang berkaitan dengan Upaya-upaya Perlindungan Khusus. Di samping data primer yang berkaitan dengan lima aspek ini, juga digali data primer yang berhubungan dengan penulisan gambaran umum Kota Denpasar.

Data primer yang digali dari lapangan melalui pencatatan berbagai informasi yang diperoleh dari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak seperti kasus pelecehan seksual, *trafficking*, *faedofilia* dan lain-lain. Kasus-kasus seperti ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti media massa maupun dari hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan anak. Semua data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

1.5 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh kelengkapan data dalam menyusun buku Profil Anak Kota Denpasar ini adalah dengan cara melakukan pencatatan langsung dari sumber data. Pencatatan ini dilakukan oleh anggota tim penyusun buku profil anak maupun oleh petugas instansi yang menjadi sumber data.

Setelah data terkumpul selanjutnya data diolah dan disusun sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.

Selanjutnya setelah data dimasukkan ke dalam tabel-tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang ada pada masing-masing klaster, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dilengkapi dengan penafsiran terhadap data yang tersaji. Dalam analisis lebih ditekankan pada permasalahan kesejahteraan dan perlindungan anak yang terjadi di Kota Denpasar sehingga dapat teridentifikasi isu-isu penting yang terkait dengan persoalan anak yang terjadi di Kota Denpasar. Dengan demikian dapat mempermudah para perencana dalam menyusun program.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari buku profil anak Kota Denpasar Tahun 2013 terdiri dari lima (5) bab yakni: bab I merupakan bab pendahuluan dengan beberapa sub bab; bab II Definisi Konsep dan Landasan Hukum; bab III Gambaran umum Kota Denpasar; bab IV profil anak Kota Denpasar; dan bab V penutup. Bab IV merupakan uraian inti yang berkaitan dengan hak-hak dasar anak yang meliputi lima cluster yakni: ***pertama*, Hak-hak Sipil dan Kebebasan**. Pada cluster ini dibahas mengenai beberapa indikator antara lain adalah anak yang mempunyai akte kelahiran, jumlah dan jenis organisasi anak yang ada, fasilitas informasi layak anak dan forum anak.

Kedua; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dengan beberapa indikatornya yang dibahas antara lain: jumlah keluarga dan rata-rata jiwa dalam keluarga, penduduk 10 tahun ke atas menurut status kawin dan jenis kelamin, perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin, jumlah nikah cerai dan rujuk, lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak lembaga kesejahteraan sosial anak, banyaknya anak yang diadopsi menurut kabupaten/kota, penduduk usia 5-18 tahun

dan katagori terlantar, jumlah anak jalanan, jumlah kelompok bermain dan jumlah anak asuh, jumlah taman penitipan anak dan jumlah anak asuh, jumlah panti asuhan dan jumlah anak asuh.

Ketiga; kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pada cluster ini dibahas mengenai: perempuan usia subur dan jumlah anak lahir hidup, angka kematian bayi, angka kematian anak balita, angka kematian ibu, persentase balita dan status gizi, indikator kelahiran dan kematian penduduk, jumlah anak yang mengalami keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami, penduduk usia 0-18 tahun yang cacat dan jenis kecacatan, jumlah balita menurut lama disusui, persentase balita dan penolong kelahiran, persentase balita yang mendapat imunisasi, jumlah anak dan fasilitas kesehatan, jumlah anak dan tenaga medis per kabupaten/kota, jumlah pojok ASI.

Ke empat; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Indikator yang dibahas pada aspek ini antara lain meliputi; penduduk menurut golongan umur, jenis kelamin dan status pendidikan; Penduduk 5 tahun ke atas menurut golongan umur dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan; Angka partisipasi sekolah (APS), Angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), penduduk usia 7-18 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin, angka putus sekolah; rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin; dan angka mengulang kelas, angka melanjutkan, lembaga pendidikan, fasilitas kreatif dan rekreatif.

Ke lima; Upaya-upaya perlindungan khusus; dengan beberapa indikatornya antara lain; anak yang memerlukan perlindungan khusus, jumlah anak yang melanggar hukum; jumlah terdakwa anak dalam perkara pidana yang diajukan ke sidang pengadilan berdasarkan jenis hukuman; jumlah anak korban kekerasan, anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan, anak korban perdagangan orang, jumlah anak menurut kegiatan yang dilakukan; jumlah anak di bawah 18 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha; jumlah anak yang bekerja

menurut status pekerjaan; jumlah anak yang bekerja menurut jam kerja selama seminggu yang lalu; persentase anak yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan; jumlah anak korban penyalahgunaan narkotika; dan jumlah anak pengidap HIV/AIDS, dan jumlah anak jalanan. Uraian per cluster ini nantinya tentu akan disesuaikan dengan data yang tersedia dan diperoleh di lapangan.

BAB II

DEFINISI KONSEP DAN LANDASAN HUKUM

Untuk memperoleh persamaan persepsi, maka penting dijelaskan definisi dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penulisan ini. Oleh karena itu sebelum sampai pada fokus pembahasan tentang Profil Anak Kota Denpasar terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa konsep yang terkait dengan penyusunan profil ini. Demikian juga halnya dengan landasan hukum perlu dijelaskan guna mendapat gambaran tentang landasan normatif yang sudah ada dan sudah diterapkan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Adapun konsep dan landasan hukum yang dimaksud seperti diuraikan di bawah ini:

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam konteks ini akan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Sejak disyahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kini telah berubah menjadi UU. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka banyak orang/lembaga yang menggunakan pengertian anak sesuai dengan yang tercantum dalam UU tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 1 diartikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selain definisi ini, masih ada definisi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 1 (2) dinyatakan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Meskipun ada definisi lain selain yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014, namun dalam hal

ini tetap mengacu pada definisi yang tertera dalam UU 35/2014 tentang Perlindungan anak.

Sejak diundangkannya UU ini, maka selama ini dalam penanganan kasus-kasus anak pengertian anak yang dipakai mengacu pada UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi terakhir ini sesuai dengan definisi yang digunakan dalam Konvensi Hak Anak PBB. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa “yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Seperti telah disinggung di atas, dalam pembuatan Profil Anak ini, definisi yang digunakan mengacu pada definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang saat ini telah berubah menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Dengan menggunakan acuan ini, maka nantinya jika ada isu-isu yang terkait dengan anak, akan lebih mudah dalam penanganannya, dan perlindungan terhadap anak juga semakin terjamin karena sudah ada payung hukum yang pasti.

2.1.2 Pengertian Kesejahteraan Anak

Pengertian mengenai kesejahteraan anak diambil dari UU. No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam UU ini yang dimaksudkan dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, mental dan sosial untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas.

Dari definisi ini tergambar bahwa untuk mencapai kesejahteraan anak diperlukan berbagai upaya komprehensif baik menyangkut kehidupan ekonomi, kesehatan, sosial maupun budaya. Dengan demikian, anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan

dapat tumbuh kembang secara wajar dan dapat terhindar dari berbagai ancaman dalam menjalani kehidupannya. Hal ini pada gilirannya akan dapat menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berguna bagi pembangunan bangsa Indonesia umumnya dan pembangunan Kota Denpasar khususnya.

2.1.3 Pengertian Perlindungan Anak

Di era globalisasi seperti saat ini upaya perlindungan anak mutlak diperlukan, hal ini mengingat anak merupakan individu yang rentan terhadap perilaku kekerasan baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah. Dalam posisi yang berada dalam situasi ketergantungan pada orang lain terutama pada orang dewasa, maka anak seringkali menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya kasus-kasus kekerasan dan penyalahgunaan hak-hak anak. Hal ini terbukti belakangan ini nampak semakin marak terjadi kasus kekerasan terhadap anak baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas.

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian dari perlindungan anak, maka dalam konteks ini penting disampaikan definisi mengenai perlindungan anak. Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 2 yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Definisi konsep di atas menggambarkan bahwa masyarakat diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dan perlakuan diskriminasi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dapat menjadi generasi penerus yang handal. Dengan adanya upaya perlindungan

yang maksimal, mereka akan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan usianya dan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan semaksimal mungkin.

2.2 Landasan Hukum

2.2.1 Undang-Undang Perlindungan Anak

Keberadaan regulasi untuk menghindari terjadinya berbagai persoalan termasuk persoalan anak memang sangat diperlukan. Dikeluarkannya Undang-undang No.23 tahun 2002 yang kini telah diubah menjadi UU No.35/2014 tentang perlindungan anak merupakan upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk perlakuan buruk terhadap anak yang selama ini masih sering terjadi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, sedangkan Penjelasan Undang-undang tersebut diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Nama lengkap undang-undang tersebut adalah Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan ditetapkan Undang-undang Perlindungan Anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. Bahwa berbagai UU hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terdiri dari 14 bab, 93 pasal. Bab I adalah ketentuan umum yang berisi pengertian mengenai istilah-istilah atau konsep-konsep yang dimuat dalam undang-undang ini (pasal 1). Bab II tentang asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 2-3). Bab III mengatur tentang hak dan kewajiban anak (4-19). Bab IV mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 20-26). Bab V tentang kedudukan anak yang berisi ketentuan mengenai identitas anak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran (pasal 27-28). Bab VI mengatur tentang kuasa asuh terhadap anak dalam hal orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak (pasal 30-32). Bab VII tentang perwalian anak (Pasal 33-36). Bab VIII tentang pengasuhan dan pengangkatan anak (pasal 37-41). Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus bagi anak (pasal 42-71). Bab X tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan anak (72-73). Bab XI tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (pasal 74-76). Bab XII tentang Ketentuan Pidana (pasal 77-90). Bab XIII mengatur tentang ketentuan peralihan (pasal 91). Bab XIV tentang ketentuan penutup.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka dan berbagai kasus yang menimpa anak dapat dihindari.

2.2.2 Konvensi Hak-hak Anak

Instrumen yuridis lain yang terkait anak selain UU No.35 tahun 2014 adalah konvensi hak anak (KHA). Konvensi Hak Anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 melalui resolusi 44 / 25. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (1), konvensi yang berisi 25 pasal ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.

Konvensi Hak Anak dapat dikatakan merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Meski demikian, Konvensi Hak Anak tetap berpegang teguh pada standar dari prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Menurut Konvensi ini, anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Selain itu, Konvensi Hak Anak mencakup sekaligus hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Candra Gautama, 2000: 2).

Struktur Konvensi Hak Anak dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, mukadimah (*preamble*) yang berisi berbagai pemikiran dan keprihatinan yang mendasari diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. *Kedua*, pasal-pasal yang mengatur hak-hak anak (pasal 1-41). *Ketiga*, pasal-pasal yang mengatur mekanisme

pemantauan dan pelaksanaan konvensi (pasal 42-54). *Keempat*, pasal-pasal yang mengatur soal pemberlakuan Konvensi.

Berdasarkan isi pasal-pasalnya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum Konvensi Hak Anak. Empat prinsip umum itu adalah:

- (1) *Nondiskriminasi*. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi harus diberlakukan sama kepada setiap anak (Pasal 2 ayat 1)
- (2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1 Konvensi)
- (3) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*). Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of child*)
- (4) Menghargai pandangan anak. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan: "Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak"

2.2.3 Perda Kota Denpasar No. 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pada tahun 2014 Kota Denpasar telah mengesahkan satu regulasi yang sangat penting dalam upaya melindungi perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar. Regulasi yang dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2014. Perda ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar. Untuk kepentingan ini, maka dalam perda ini tercantum bahwa pemerintah kota wajib membentuk lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pelayanan terpadu berbasis Rumah sakit, dan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT). Dengan adanya PERDA ini berarti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Denpasar sudah mempunyai payung untuk melindunginya, terutama perlindungan terhadap korban.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

3.1 VISI dan MISI Kota Denpasar

1. VISI

Dalam upaya mengarahkan pembangunan Kota Denpasar, maka pemerintah merumuskan Visi: **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan**. Visi ini selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi.

2. MISI

Adapun misi pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Penguatan jatidiri masyarakat kota Denpasar berlandaskan budaya Bali;
2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penegakan supremasi hukum (*law inforcement*);
4. Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (*welfare society*);
5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (*Visi Misi Kota Denpasar, 2010-2015 dalam etd.ugm.ac.id*)

3.2 Penjelasan Lambang

Setiap daerah memiliki lambang daerah tersendiri, demikian juga halnya dengan Kota Denpasar. Lambang daerah Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dan garis

pinggir warna hitam. Motto “PURRADHIPA BHARA BHAVANA” artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Di dalam segi lima sama sisi tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut.

Gambar: 3.1 Lambang Kota Denpasar



1. Segi lima sama sisi

- Dasar dengan bentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
- Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
- Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. Padmasana Jagatnatha

- Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
- Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.
- Warna kuning emas pada pura jagatnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

- Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
- Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
- Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

- Melambangkan kebudayaan yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
- Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah, melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar aselalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) buah, melambangkan

- Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.
- Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (pebruari).
- Kapas dengan bunga berjumlah 9 (sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Pebruari 1992.

3.3 Letak Geografis

Jika dilihat dari segi geografisnya, wilayah Kota Denpasar sebagian besar tergolong daerah dataran. Secara geografis, Kota

Denpasar terletak di tengah-tengah Pulau Bali, tepatnya di antara 08 35" 31" – 08 44" 49" Lintang Selatan dan 115 10" 23' – 115o 16" 27" Bujur Timur. Dengan posisi yang demikian ini maka pantaslah Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Bali. Daerahnya berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah selatan Selat Badung, dan di sebelah Barat Kabupaten Badung. Secara administratif wilayah Kota Denpasar memiliki 4 Kecamatan, dan 43 desa/kelurahan. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 desa/kelurahan, Denpasar Timur 11 desa/kelurahan, Denpasar Barat 11 desa/kelurahan, dan Denpasar Utara 11 desa/kelurahan. Berikut adalah peta wilayah Kota Denpasar yang terbagi menjadi empat kecamatan.

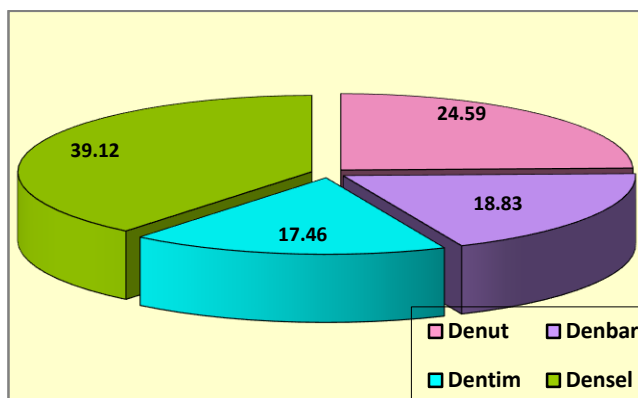
Gambar: 3.2. Peta Kota Denpasar



Luas wilayah Kota Denpasar mencapai 127,78 Km² atau 12.778 Ha (2,18 persen dari luas wilayah Provinsi Bali), termasuk tambahan reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha. Berdasarkan tata guna tanah, luas tersebut meliputi tanah sawah 2.717 Ha, dan tanah kering 9.999 Ha. Tanah kering terdiri dari tanah pekarangan 7.714 Ha, tanah tegalan 396 Ha, tanah tambak/kolam 9 Ha, tanah sementara tidak

dusahakan 81 Ha, tanah hutan 613 Ha, tanah perkebunan 35 Ha, dan tanah lainnya seluas 1.162 Ha. Luas ini terbagi ke dalam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Selatan seluas 49,99 Km² atau 39,12 persen dari Kota Denpasar, 0,89 persen dari luas Provinsi Bali, Denpasar Timur, seluas 22,31 Km² (17,46 persen dari Kota Denpasar, dan 0,4 persen dari Provinsi Bali), Denpasar Barat, seluas 24,13 Km² (18,83 persen dari Kota Denpasar, dan 0,43 persen dari Provinsi Bali), sedangkan Denpasar Utara seluas 31,12 Km² (24,59 persen) dari Kota Denpasar, dan 0,55 persen dari Provinsi Bali). Di antara empat kecamatan yang ada di wilayah Kota Denpasar, tampaknya Denpasar Selatan mempunyai luas wilayah yang paling besar, yaitu 49,99 Km², dan Denpasar Timur dengan wilayah yang paling sempit (22,31 Km²) kurang dari setengah luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Secara rinci luas wilayah Kota Denpasar menurut kecamatan seperti tampak pada gambar 3.2 berikut ini.

Gambar: 3.4 Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Kecamatan, Th. 2014



3.4 Kondisi Demografi

Salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pariwisata seperti halnya Kota Denpasar adalah masalah kependudukan. Urbanisasi sepertinya susah dibendung karena Kota Denpasar menjadi incaran setiap pencari kerja. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan kependudukan

menjadi salah satu masalah yang serius. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar mempunyai masalah kependudukan yang cukup kompleks, baik yang berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, tingkat kepadatan, maupun migrasi. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap masalah ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya.

Disisi lain keberadaan penduduk juga tidak bisa diabaikan karena penduduk sebagai sumberdaya manusia merupakan modal utama dalam melaksanakan suatu pembangunan. Oleh karena itu sumberdaya manusia ini sangat penting ditingkatkan kualitasnya guna dapat dimanfaatkan secara maksimal. Komposisi penduduk menurut berbagai karakteristik baik variabel demografi itu sendiri maupun variabel pembangunan akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumber daya manusia sebagai subyek maupun obyek pembangunan.

3.4.1 Penduduk Menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk berdasarkan umur dimaksudkan untuk mengetahui komposisi penduduk usia anak-anak, remaja/usia produktif, dan usia lanjut (lansia). Penduduk Kota Denpasar pada tahun 2014 berjumlah 867,700 jiwa, yang terdiri dari 443,100 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan 424,600 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2014 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya berjumlah 850,600 jiwa. Angka ini juga menggambarkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, atau kalau dilihat sex rasionya berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki. Bila dibandingkan dengan *sex ratio* pada tahun 2013 yang hanya sebesar 103, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar lebih cepat dibandingkan penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk

Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin seperti tampak pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel: 3.1 Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2013 dan 2014

Umur	2013			2014		
	L	P	L + P	L	P	L + P
0 – 4	38,800	36,900	75,700	38,300	36,500	74,800
5 – 9	36,400	34,100	70,500	37,400	34,800	72,200
10 – 14	32,300	31,000	63,300	32,700	31,700	64,400
15 - 19	34,400	35,600	70,000	35,600	37,300	72,900
20 – 24	42,500	42,000	84,500	43,800	42,700	86,500
25 – 29	43,700	43,200	86,900	43,500	42,800	86,300
30 – 34	44,500	42,800	87,300	44,600	43,100	87,700
35 – 39	42,500	40,000	82,500	41,800	40,200	82,000
40 – 44	39,200	35,800	75,000	41,200	36,900	78,100
45 – 49	27,500	24,200	51,700	28,900	25,800	54,700
50 – 54	19,100	17,000	36,100	20,200	17,900	38,100
55 – 59	13,600	12,700	26,300	14,200	13,500	27,700
60 - 64	8,500	7,800	16,300	9,000	8,000	17,000
65 - 69	5,400	5,700	11,100	5,600	5,700	11,300
70 - 74	3,300	3,300	6,600	3,200	3,400	6,600
75 +	2,700	4,100	6,800	3,100	4,300	7,400
Total	434,400	416,200	850,600	443,100	424,600	867,700

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2014

Bila dilihat komposisi penduduk per kelompok umur tampak bahwa kelompok umur 20-44 tahun jumlahnya paling tinggi. Kelompok umur ini memang merupakan kelompok umur produktif. Sementara untuk kelompok umur paling sedikit adalah penduduk yang tergolong lanjut usia yakni 60 tahun ke atas.

Struktur umur penduduk mencerminkan perubahan yang terjadi pada komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, pada satu kurun waktu tertentu. Pada awal masa transisi demografi, kelahiran yang tinggi menyebabkan proporsi penduduk usia muda cukup tinggi. Namun karena angka kematian juga tinggi, maka mereka yang bertahan hidup sampai usia di atasnya menjadi relatif sedikit. Teori transisi demografi ini mengenal 4 tahap : pertama, angka kelahiran dan kematian bergerak pada tingkat yang tinggi; kedua, angka kematian mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, tetapi angka kelahiran masih tinggi; ketiga angka kelahiran dan kematian bergerak, menurut waktu pada tingkat yang rendah. Implikasi dari struktur penduduk seperti ini mengakibatkan beban perempuan menjadi lebih berat. Oleh karena itu, berbagai program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk perempuan seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain amat diperlukan sehingga wanita bisa berperan optimal di segala bidang pembangunan. Di samping itu program/kebijakan yang mengarah kepada perlindungan terhadap hari tua seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa juga sangat penting agar kehidupan penduduk usia lanjut bisa lebih terjamin.

Keadaan penduduk Kota Denpasar dewasa ini dapat dikatakan sudah sampai di antara pertengahan dan akhir dari tahap ketiga. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka kelahiran maupun kematian, terutama jika dikaitkan dengan kelompok umur yang tergolong anak-anak sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa semua penduduk yang belum berusia 18 tahun adalah dikategorikan sebagai anak-anak. Mereka ini merupakan penduduk yang harus mendapatkan perlindungan dan dapat terpenuhi hak-haknya.

3.5 Pemerintahan

Sebagai ibu kota Provinsi Bali sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan pariwisata, Kota Denpasar menjalankan berbagai program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi yang diembannya. Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan pemerintahannya selalu berorientasi pada pembangunan yang berwawasan budaya. Secara administratif, Kota Denpasar adalah suatu pemerintahan daerah yang wilayahnya dibagi atas 4 kecamatan, 43 desa/kelurahan. Dari 4 kecamatan tersebut jumlah desa/kelurahannya hampir merata, yakni Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 desa/kelurahan, dan kecamatan Denpasar Timur, Barat dan Utara, masing-masing terdiri atas 11 desa/kelurahan. Dari 43 desa/kelurahan tersebut yang berstatus kelurahan 16 buah dan desa 27 buah. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 6 kelurahan dan 4 desa. Denpasar Timur, 4 kelurahan dan 7 desa, Denpasar Barat, 3 kelurahan dan 8 desa, dan Kecamatan Denpasar Utara juga terdiri dari 3 kelurahan dan 8 desa. Secara rinci jumlah desa/kelurahan serta banjar yang ada di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel. 3.2.

Tabel: 3.2. Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar/Lingkungan per Kecamatan Dirinci menurut Dinas dan Adat Tahun 2014

Kecamatan	Letak Ibu Kota Kecamatan	Desa		Banjar	
		Dinas	Adat	Dinas	Adat
Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	11	10	102	99
Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	11	12	87	97
Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	10	11	105	90
Denpasar Barat	Kel. Padangsambian	11	2	112	106
Jumlah		43	35	407	392

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 3.4 tampak bahwa Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah desa adat terbanyak, sementara kecamatan Denpasar Barat hanya memiliki dua desa adat. Masing-masing desa/kelurahan ini tersebar lagi menjadi banjar dinas dan atau banjar adat yang secara keseluruhan berjumlah 407 buah. Setiap desa dinas dipimpin oleh kepala desa atau yang lazim disebut *perbekel* dan lingkungan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Sementara itu, untuk Masing-masing desa/ kelurahan ini tersebar lagi menjadi banjar dinas sebanyak 407 dan atau banjar adat berjumlah 392 buah.

Setiap desa dinas dipimpin oleh kepala desa atau yang lazim disebut *perbekel* dan lingkungan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Sementara itu, untuk setiap desa adat/pakraman dipimpin oleh kelian adat yang pada dasarnya mempunyai kewenangan secara otonom dalam mengatur kepentingan yang berkaitan dengan masalah adat seperti urusan kegiatan keagamaan baik yang berkaitan dengan *kahyangan tiga* (Pura Puseh, Dalem dan Desa) maupun kegiatan adat lainnya. Desa pakraman adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang melaksanakan fungsi sosial relegius.

Dalam menjalankan pemerintahannya, berbagai lembaga pemerintah dalam bentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan lembaga yang berfungsi untuk membantu pimpinan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Satuan kerja perangkat daerah ini berupa Dinas/ Badan ataupun Kantor yang masing-masing menjalankan kegiatan pemerintahan sesuai tupoksinya.

3.6 Sarana dan Prasarana Umum

Seperti telah disampaikan di atas bahwa Kota Denpasar merupakan ibu kota provinsi dan menjadi pusat pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaannya sudah tentu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Sebagai sebuah kota yang berwawasan budaya dan

mengutamakan pelayanan publik dengan motto “Sewaka Dharma”, Kota Denpasar diharapkan bisa berfungsi untuk dapat memberikan kehidupan yang layak bagi semua kelompok umur masyarakat Kota Denpasar termasuk kelayakan terhadap anak-anak.

Terkait dengan urusan anak-anak saat ini sudah ada lembaga khusus yang menanganinya yakni Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, urusan anak-anak juga terintegrasi dalam berbagai program pembangunan yang ada di beberapa SKPD atau lembaga lainnya seperti: Badan Pemberdayaan masyarakat Desa melalui Program PKK, Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan program PAUD dan lain-lain, forum anak Kota Denpasar, dan lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus. seperti tampak pada gambar 3.1 dan 3.2 adalah salah satu lembaga pendidikan PAUD yang ada di kota Denpasar. Keberadaan sekolah PAUD di Kota Denpasar tersebar di semua kecamatan, hanya saja jumlahnya cukup bervariasi. Data jumlah PAUD yang ada di Kota Denpasar secara lengkap diuraikan pada bab IV dari buku ini.

Gambar: 3.4 Sekolah PAUD di Kota Denpasar



<https://www.google.com/>

Gambar: 3.5 Sekolah PAUD di Kota Denpasar



<https://www.google.com/>

Berbagai sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan perkembangan sumber daya manusia (SDM), terutama bagi anak-anak, antara lain di di bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan KB telah cukup tersedia di Kota Denpasar. Jumlah panti asuhan misalnya, terdapat sebanyak 14 buah tersebar dii seluruh kecamatan, organisasi sosial 4 buah, kelompok usaha orang cacat 7 buah, dan, karang taruna 43 buah.

Pembangunan bidang pendidikan juga menjadi prioritas dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), termasuk anak-anak. Terkait dengan hal tersebut, maka penyediaan sarana dan prasarana terus diupayakan. Di Kota Denpasar sarana pendidikan untuk sekolah dasar (SD), yang meliputi sekolah negeri, swasta, dan Madrasah Ibtidayah untuk tahun 2014 sebanyak 222 buah dengan jumlah guru 3.609 orang, dan murid mencapai 100.831orang. SLTP sebanyak 62 buah dengan jumlah guru 2465 orang, dan murid sebanyak 36.267 orang. SLTA sebanyak 33 sekolah, dengan jumlah guru 1.540 orang, dan murid mencapai 24.068 siswa. Selanjutnya penyediaan sarana

dan prasarana Kesehatan dan KB juga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit pemerintah, TNI/Polri dan swasta sebanyak 16 buah, Puskesmas Puskesmas sebanyak 10 buah, puskesmas pembantu sebanyak 26 buah, dan Klinik/ruang bersalin (RB dan BPG) sebanyak 54 buah.

Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, Kota Denpasar juga masih banyak menyediakan ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain dan berkreaitivitas, seperti tampak pada gambar 3.3.

Gambar 3.6 Arena bermain Anak di wilayah Kota Denpasar



Sumber: <https://www.google.com>

Arena bermain anak-anak juga disediakan oleh pusat-pusat perbelanjaan/mall, rumah makan dan restoran yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar seperti tampak pada gambar 3.4. Oleh karena itu, julukan Denpasar sebagai "kota layak anak", tampaknya cukup representatif bagi Kota Denpasar.

BAB. IV

PROFIL ANAK KOTA DENPASAR

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) mendefinisikan 'anak' secara umum sebagai manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sesuai dengan tingkat perkembangan biologis dan sosialnya, anak belum mampu melindungi dirinya secara maksimal demi masa depan dan kepentingan terbaiknya sendiri. KHA adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak (Laurike, dkk).

Selama ini dalam penanganan kasus-kasus anak, pengertian anak yang dipakai mengacu pada UU No. 23/2002 yang kini sudah diubah menjadi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi ini sesuai dengan definisi yang digunakan dalam Konvensi Hak Anak PBB. (Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak). Dikarenakan karakteristiknya yang khas anak-anak membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan serta perlindungan khusus. Secara normatif upaya untuk melindungi anak telah tertuang dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM serta UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak. Di samping itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) sebagai upaya terwujudnya hak anak Indonesia.

Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. John Locke mengemukakan bahwa **anak** merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari

lingkungan. Sedangkan Augustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa (<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis>).

Sobur (1988 dalam Damayanti, 1992), juga mengartikan **anak** sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Menurut Haditono (dalam Damayanti, 1992), anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum.

Secara umum permasalahan anak yang muncul di wilayah perkotaan seperti tersebut di atas terjadi tentu tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat baik yang dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap permasalahan anak tidak mau tinggal diam membiarkan persoalan ini berkembang semakin parah.

Bagaimana gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Denpasar? Hal ini akan di bahas secara lengkap pada uraian berikut ini. Persoalan kesejahteraan dan perlindungan anak yang akan dibahas dalam tulisan ini pada dasarnya menyangkut lima klaster yakni: 1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan; 2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif; 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus. Ke lima klaster ini akan dibahas secara rinci pada uraian berikut ini.

4.1 Hak-hak Sipil dan Kebebasan.

4.1.1 Penduduk Usia Anak di Kota Denpasar

Gambaran tentang ketersediaan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan tercermin melalui komposisi penduduk menurut berbagai karakteristiknya, baik melalui variabel demografi maupun variabel pembangunan. Sebagai modal dalam pembangunan, tentu saja kualitas sumberdayamanusia sangat penting menjadi perhatian khusus. Karena dengan kualitas yang bagus maka sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan mempunyai penduduk yang cukup padat dan heterogin dalam berbagai aspek. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur sangat penting disajikan karena dapat menggambarkan kondisi penduduk dilihat dari perspektif gender, juga menggambarkan besarnya penduduk pada usia anak untuk tingkatan usia sekolah.

Tabel berikut memberikan gambaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Sesuai dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa semua penduduk yang belum berusia 18 tahun adalah dikategorikan sebagai anak-anak.

Apabila dikelompokkan menurut acuan BPS, dengan distribusi 5 tahunan, maka usia 18 tahun masuk pada kelompok 15-19 tahun, ada perbedaan konsep anak berdasarkan kelompok umur antara Undang-undang 23 Tahun 2002 dengan BPS, sehingga terjadi perbedaan jumlah pada kelompok anak usia 0-18 tahun, karena usia 19 tahun masuk ke dalam kelompok usia ini. Secara rinci pengelompokkan anak berdasar usia seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, 2013 dan 2014

NO	KLP UMUR (TH))	2013			2014		
		JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMP	L + P	LAKI-LAKI	PEREMP	L + P
1	0 - 4	38,800	36,900	75,700	38,300	36,500	74,800
2	5 - 9	36,400	34,100	70,500	37,400	34,800	72,200
3	10 - 14	32,300	31,000	63,300	32,700	31,700	64,400
4	15 - 19	34,400	35,600	70,000	35,600	31,300	72,900
Jumlah		141,900	137,600	279,500	144.000	134.300	284.300
		(50,7%)	(49,3%)	(100%)	(52,7%)	(47,3%)	(100%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menjelaskan adanya peningkatan jumlah pada penduduk laki-laki usia anak dari tahun 2013 ke tahun 2014, tetapi terjadi penurunan pada jumlah penduduk perempuan usia anak. Apabila dilihat lebih lanjut, terjadinya peningkatan pada jumlah penduduk laki-laki ada pada kelompok usia 5-9 tahun dan kelompok usia 15-19 tahun, sedangkan pada penduduk perempuan terlihat penurunan yang cukup signifikan pada kelompok usia 15-19 tahun. Secara keseluruhan untuk semua kelompok umur terjadi peningkatan penduduk dari tahun 2013 ke tahun 2014.

Dilihat dari perspektif gender table di atas menunjukkan perbedaan yang agak besar pada semua kelompok umur laki-laki dan

perempuan. Apabila dilihat dari keseluruhan kelompok umur selisih persentase jumlah anak laki-laki dan perempuan menunjukkan angka 3,4% meningkat dibanding tahun 2013 yang menunjukkan angka 1,4%. Kelompok umur 10-14 tahun menunjukkan jumlah yang terendah dibandingkan kelompok umur yang lain, baik pada tahun 2013 maupun untuk tahun 2014. Sedangkan kelompok umur 0-4 tahun menunjukkan jumlah tertinggi diantara kelompok umur yang lain, pada tahun 2013 maupun 2014. Hal ini menunjukkan pada dua tahun tersebut tercatat umur balita yang cukup besar. Kelompok usia 0-4 tahun ini merupakan kelompok usia emas, dimana pertumbuhan mereka sangat memerlukan perhatian yang lebih besar. Untuk itu semua program pemerintah yang terkait dengan pertumbuhan balita seperti penggalakan ASI eksklusif, imunisasi dan program lainnya, harus selalu dipantau sehingga tumbuh kembang mereka dapat terjaga dengan baik.

Kelompok usia anak ini nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Mengingat jumlah mereka cukup besar untuk tahun 2013 sebesar lebih dari 32% dari jumlah penduduk kota Denpasar, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengelola kelompok usia anak-anak ini agar menjadi orang-orang yang lebih produktif, memiliki kualitas SDM yang handal kedepannya.

4.1.2 Kepemilikan Akta Kelahiran

Salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan resmi terhadap anak adalah dimilikinya akte kelahiran sebagai identitas diri secara hukum bagi seorang anak. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak baru lahir yang dituangkan dalam akte kelahiran. Untuk mendapatkan identitas ini setiap orang tua harus mendaftarkan kelahiran anaknya ke kantor catatan sipil yang memang bertugas untuk mendaftarkan segala bentuk pencatatan akte kelahiran maupun akte perkawinan.

Orang tua seharusnya segera mengurus akta lahir bagi anaknya yang baru lahir, sesuai aturan tidak lewat dari 42 hari. Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Seringkali orang tua baru merasakan pentingnya akta kelahiran ketika anaknya memasuki usia sekolah karena hal ini merupakan salah satu persyaratan masuk sekolah, juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Data dari kantor catatan sipil yang berhasil dihimpun menggambarkan akte kelahiran untuk anak per kecamatan tahun 2014 seperti tampak pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Anak yang memiliki akte Kelahiran tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Anak		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Denpasar Selatan	27.499	25.683	53.182
2.	Denpasar Timur	18.206	16.856	35.062
3.	Denpasar Barat	28.745	26.824	55.569
4.	Denpasar Utara	24.688	22.977	47.665
	Jumlah	99.138	92.340	191.478

Sumber : Catatan Sipil Kota Denpasar, 2014

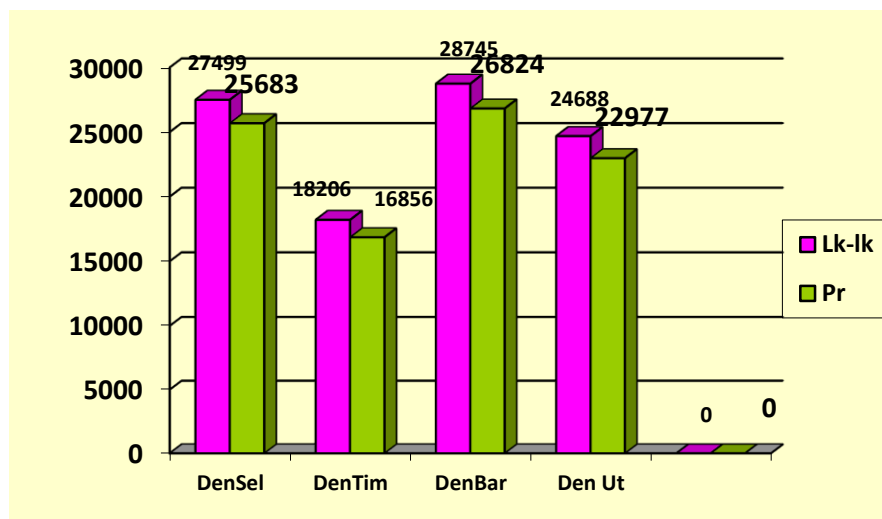
Tabel di atas menggambarkan jumlah anak yang sudah memiliki akte kelahiran yang cukup besar (191.478 anak) apabila dibandingkan dengan jumlah usia anak sampai usia 19 tahun (284.300 anak) di kota Denpasar pada tahun yang sama, atau lebih dari 67% sudah memiliki akte kelahiran. Untuk meminimalisir anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepemilikan akte kelahiran antara lain melalui gebyar dan jemput bola (jebol) dalam artian para petugas kantor catatan sipil mendatangi langsung daerah-daerah tertentu yang diperkirakan masih banyak penduduknya tidak memiliki akte kelahiran untuk mencatatkan atau membuatkan akta untuk anaknya.

Apabila dicermati lebih jauh, jumlah anak yang memiliki akte kelahiran per kecamatan, menunjukkan Kecamatan Denpasar Barat menunjukkan jumlah terbesar (29%). Sedangkan Kecamatan Denpasar Timur menunjukkan jumlah yang paling kecil (18,3%). Dari data ini belum dapat diketahui apakah jumlah yang tercatat berkorelasi positif dengan jumlah anak yang ada di masing-masing kecamatan, atau karena alasan kurangnya perhatian orang tua untuk mencatatkan anaknya pada saat kelahiran.

Dilihat dari perspektif gender tampaknya anak laki-laki lebih banyak tercatat memiliki akta kelahiran dibandingkan anak perempuan, pada semua (empat) kecamatan di kota Denpasar, dengan perbandingan 51,77% untuk anak laki-laki dibanding 48,23% untuk anak perempuan. Kondisi ini belum dapat dijelaskan secara pasti penyebabnya, apakah memang jumlah bayi laki-laki lebih banyak dibanding bayi perempuan yang lahir, ataukah dikarenakan penyebab lain seperti belum terjangkaunya lembaga pencatat bagi penduduk, atau kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini perlu dilakukan kajian lebih jauh.

Jika digambarkan komposisi jumlah kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak laki-laki dan perempuan pada masing-masing kecamatan secara persentase tampak seperti pada gambar 4.1 berikut ini.

Gambar: 4.1. Komposisi Kepemilikan Akte Kelahiran menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2014



4.1.3 Fasilitas Informasi Layak Anak

Menurut Susetiorini Adiningsih (dalam <http://groups.yahoo.com>) dituliskan, dalam Konvensi Hak Anak terdapat 31 Hak Anak, salah satunya adalah: Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Dijelaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, dan menyatakan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal itu melanggar hak orang lain.

Salah satu indikator penting yang menjadi persyaratan untuk menuju kota layak anak, yaitu adanya fasilitas informasi yang layak anak karena hal ini penting untuk menunjang tumbuh kembang anak, sehingga memungkinkan anak berperan aktif dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan mereka.

Kota Denpasar telah memiliki fasilitas pusat informasi yang layak anak seperti perpustakaan. Kita sadari bersama bahwa perpustakaan merupakan sumber informasi ilmu pengetahuan, oleh karena itu keberadaan fasilitas ini sangat diperlukan baik di setiap lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan paling bawah sampai jenjang pendidikan tinggi, maupun di setiap wilayah karena meningkatnya kebutuhan informasi. Di Kota Denpasar tampak sudah

tersedia perpustakaan pada semua jenjang pendidikan dengan jumlah yang cukup memadai. Demikian juga perpustakaan keliling sudah tersedia 2 (dua) unit dan ada satu unit taman bacaan/pojok baca. Secara rinci tersedianya perpustakaan periode tahun 2012/2013, dan tahun 2013/2014 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.3 Fasilitas Informasi Layak Anak Kota Denpasar Tahun 2012/2013 dan 2013/2014

Perpustakaan	Jumlah	
	2012/2013	2013/2014
- TK	231	-
- SD	179	173
- SMP	66	54
- SMA	28	29
- SMK	31	26
Perpustakaan Keliling	3	3
Taman/Pojok Baca	1	1

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar 2014

Tabel di atas menggambarkan perpustakaan yang tersedia di beberapa tingkat sekolah mengalami penurunan jumlah, penurunan terbesar pada jumlah perpustakaan di tingkat SD, perlu dikaji lebih lanjut factor penyebabnya. Sedangkan data jumlah perpustakaan di tingkat Sekolah taman Kanak-kanak tidak tercatat datanya untuk tahun 2014.

Jumlah perpustakaan di tingkat Sekolah Dasar adalah terbanyak. Hal ini dimungkinkan mengingat jumlah SD yang ada di kota Denpasar adalah terbanyak dibanding jenjang pendidikan yang lain, oleh karena pada tingkatan SD inilah penting diletakkan dasar pengetahuan bagi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia. Anak-anak harus diperkenalkan sejak usia dini perlunya memperoleh informasi pengetahuan yang layak bagi mereka, agar mereka sadar informasi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan

mendekatkan anak-anak dengan budaya membaca. Kita sadari bersama bahwa perpustakaan merupakan sumber informasi ilmu pengetahuan, oleh karena itu keberadaan fasilitas ini sangat diperlukan disetiap lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan paling bawah sampai jenjang pendidikan tinggi, sehingga kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi.

Upaya penyediaan perpustakaan keliling serta taman/pojok baca telah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat umum baik remaja maupun anak-anak yang ada di luar sekolah yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dengan cara memanfaatkan perpustakaan keliling. Melalui cara ini mereka dapat mengakses perpustakaan dengan lebih mudah, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan

4.1.4 Organisasi Anak/ Kelompok Bermain

Sebagaimana halnya manusia dewasa, anak juga mempunyai hak dalam kehidupan social mereka, yaitu: Hak untuk bebas berserikat dan Hak untuk bebas berkumpul secara damai. Dua hak tersebut juga tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Susetiorini Adiningsih, dalam <http://groups.yahoo.com>). Sedangkan Laurike, dkk, (dalam Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI), menjelaskan adanya Hak dasar anak yang keempat yaitu Partisipasi, yang tercantum dalam pasal 15 dalam konvensi Hak Anak, yang menyatakan: 'Anak berhak untuk bertemu dengan orang lain dan untuk bergabung atau membentuk suatu perkumpulan, kecuali jika hal itu melanggar hak orang lain'

Setiap anak berhak untuk mengutarakan pemikirannya secara bebas. Untuk itu maka anak harus ditanya pendapatnya, dan pendapat tersebut harus dihormati serta diperhitungkan dalam semua keputusan yang menyangkut hidup anak tersebut baik dalam keluarga,

sekolah, lingkungan masyarakat, sampai di pengadilan. Termasuk di dalamnya hak anak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang mempunyai dampak pada anak. Selain itu juga memungkinkan anak berperan aktif dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan mereka. Pasal tentang hak partisipasi dalam Konvensi Hak Anak menjelaskan Anak perlu dibimbing dan diperbaiki bagaimana mereka mengemukakan pendapatnya. Orang tua, pendidik maupun orang dewasa lain yang memberikan contoh berbicara yang baik kepada anak-anak akan banyak memberikan manfaat, antara lain Mendorong anak untuk terus giat belajar dan mengembangkan sikap percaya diri. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat menampung aspirasi dan kreatifitas anak-anak. Wadah tersebut dapat berupa lembaga/organisasi khusus bagi anak-anak, seperti taman kanak-kanak (TK) dan atau lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), dan lembaga lain, di bawah asuhan dan bimbingan para guru atau pendidik. Dengan cara ini diharapkan anak-anak Denpasar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas.

Di Kota Denpasar terdapat lembaga yang mengurus perlindungan dan kesejahteraan anak yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan berserikat seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak, forum anak seperti tampak pada data yang ditampilkan pada tabel seperti berikut ini. .

Tabel: 4.4 Forum Anak di Kota Denpasar, tahun 2013 dan 2014

Forum Anak Tingkat	2013	2014
Forum Anak Tingkat Kota	1	1
Forum Anak tingkat Banjar	405	405
Jumlah	406	406

Sumber: PPKB, Kota Denpasar 2012

Di Kota Denpasar sudah terbentuk forum anak sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, bakat, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Pembentukan forum anak ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak yang berprestasi menjalin hubungan komunikasi dengan baik dan lancar sesama anak-anak yang ada di Kota Denpasar.

Table 4.4 di atas menggambarkan jumlah forum anak yang sudah terbentuk, satu Forum ada di tingkat kota dan 405 forum anak di tingkat banjar. Forum anak yang ada di tingkat banjar adalah termasuk sekaa teruna di masing-masing banjar. Forum ini masih sama jumlahnya dari tahun 2013 sampai 2014.

Lembaga lain yang mengurus perlindungan dan kesejahteraan anak yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan berserikat adalah kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang telah tersedia di Kota Denpasar adalah lembaga pendidikan baik yang masih tergolong kelompok bermain maupun pendidikan taman kanak-kanak (TK). Secara rinci terlihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Jumlah Kelompok Bermain/TK di Kota Denpasar Tahun 2013/2014

Kecamatan	Taman Kanak-Kanak		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Denpasar Barat	-	67	67
Denpasar Selatan	-	54	54
Denpasar Timur	-	49	49
Denpasar Utara	1	60	61
Jlh: Th. 2013/2014	1	230	231
Th. 2012/2013	1	230	231
Th.2011/2012	1	228	229

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah Kelompok bermain/TK terbanyak yaitu sebesar 67

buah (29%) dari jumlah yang ada di Kota Denpasar) pada tahun 2013/2014. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Denpasar timur memiliki jumlah Kelompok bermain/TK yang paling sedikit yaitu 49 buah. Sedangkan apabila dilihat dari sisi pengelolaan, Kecamatan Denpasar Utara tercatat memiliki satu (1) buah Taman Kanak-kanak Negeri. Perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah, agar wadah kelompok bermain dan taman kanak-kanak negeri lebih banyak dengan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat seperti halnya di sekolah dasar.

Apabila dilihat perkembangannya, dari tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah walaupun hanya dua buah, akan tetapi kondisi ini cukup menggembirakan mengingat semakin banyak jumlah anak yang merasakan pentingnya pendidikan pada usia emas ini yang dapat tertampung. Sedangkan untuk tahun 2012/2013 ke tahun 2013/2014 belum terjadi peningkatan jumlah. Diharapkan di setiap desa ada satu TK karena wadah pendidikan TK ini menjadi jembatan setiap anak yang mau masuk sekolah dasar (SD).

Apabila dihubungkan dengan jumlah siswa yang dapat tertampung, untuk tahun 2012/2013 dari semua TK yang ada (231 buah) mampu menampung 19.006 anak-anak yang terdiri dari 9.781 orang siswa laki-laki dan 9.225 siswa perempuan. Sedangkan untuk tahun 2013/2014 terjadi penurunan jumlah siswa. Secara rinci persebaran jumlah siswa TK menurut kecamatan di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel berikut

Tabel 4.6 Jumlah Siswa Taman Kanak – Kanak menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2012/2013 dan 2013/2014

Kecamatan	2012/2013			2013/2014
	siswa			
	L	P	L+P	L+P
Den. Sel	2.663	2.769	5.432	6.287
Den. Timur	1.854	1.681	3.535	3.884
Den. Barat	2.532	2.305	4.837	3.122
Den. Utara	2.732	2.470	5.202	3.832
Jumlah Th	9.781	9.225	19.006	17 125

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menunjukkan untuk tahun ajaran 2013/2014 tidak terhimpun data secara terpisah. Dilihat dari jumlah siswa total Kota Denpasar terjadi penurunan sebesar 9,9% dari tahun 2012/2013 ke tahun 2013/2014. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk usia TK pada tahun 2013/2014 mengalami penurunan, atau oleh factor penyebab lain seperti menurunnya minat orang tua untuk mengirim anak-anaknya ke jenjang pendidikan ini dengan berbagai alasan. Kemungkinan beberapa alasannya adalah factor biaya, waktu dan tenaga, atau karena orang tua ingin membimbing sendiri anak-anak mereka seperti *home schooling*.

Sementara itu, jika dilihat jumlah siswa yang tertampung di semua lembaga TK yang ada di masing-masing kecamatan, dua kecamatan yaitu Denpasar Timur, dan Denpasar Utara mencatat jumlah siswa yang hampir sama. Jumlah siswa TK terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Selatan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan jumlah Kelompok bermain/ TK yang ada, kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah TK yang lebih sedikit dibanding kecamatan Denpasar Barat yang memiliki jumlah siswa yang paling sedikit. Melihat kondisi tersebut maka perlu menjadikan perhatian bagi pemangku kebijakan agar anak-anak dapat tertampung pada kelompok pendidikan ini.

Saat ini pendidikan anak usia dini memang sangat penting karena pendidikan sejak dini akan dapat membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan ini anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak dan dapat tumbuh kembang sesuai usianya, dan menemukan komunitas mereka. Berikut ilustrasi anak-anak dalam komunitasnya:

Gambar: 4.2 Anak PAUD dalam komunitasnya.



<http://www.google.co.id>

Gambar: 4.3 Anak-anak TK di Lingkungan Sekolahnya



Sumber: <http://www.kaskus.us/showthread>

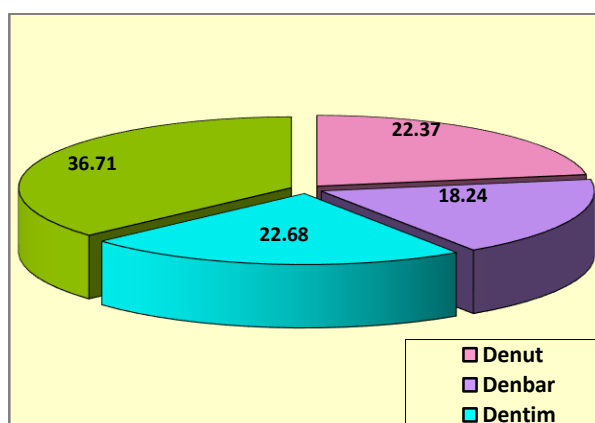
Gambar: 4.4 Pentas Budaya Anak TK Kota Denpasar



<http://www.google.co.id>

Jumlah murid taman kanak-kanak yang telah tertampung di seluruh TK pada setiap kecamatan yang ada di Kota Denpasar seperti tampak pada gambar berikut ini. Data ini menunjukkan persentase murid di masing-masing kecamatan.

Gambar 4.5 Persentase Murid Taman Kanak-Kanak menurut Jenis Kelamin di Denpasar Tahun 2013/2014



Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2014

4.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Merujuk pada Konvensi Hak Anak, bahwa anak mempunyai hak untuk tempat tinggal. Pasal 27 menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan

moral. Dalam Konvensi Hak Anak pada klaster kedua juga tercantum Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternative. Untuk itu orang tua bertanggung jawab mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, agar mereka tidak kehilangan Hak Tumbuh Kembang dalam Sebuah Keluarga.

Sudah seharusnya anak-anak dapat hidup dalam kehangatan keluarga, dengan perlindungan dan kasih sayang orang tua, mendapatkan kesehatan yang memadai, mendapatkan pendidikan yang baik, dan semua bentuk aktivitas yang lain agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Dalam membantu tumbuh kembang anak dan memberi perlindungan kepada anak, orang tua dituntut untuk memiliki pengetahuan, sikap peduli terhadap keluarga, dan perilaku yang cerdas.

Dalam Konvensi Hak Anak pada klaster kedua tercantum Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternative. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi, tempat tinggal yang layak, bimbingan orang tua. Dalam membantu tumbuh kembang anak dan memberi perlindungan kepada anak orang tua dituntut untuk memiliki pengetahuan, sikap peduli terhadap keluarga, dan perilaku yang cerdas. Untuk memfasilitasi hal tersebut pemerintah dan masyarakat bekerjasama mendirikan Lembaga Konsultasi Orang Tua tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak.

4.2.1 Anak Menikah di Bawah Usia 18 Tahun.

Prinsip ketiga dalam Konvensi Hak Anak adalah: **hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan**. Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Rumah dan sekolah harus menjadi tempat yang bersahabat dengan anak agar mereka nyaman

untuk belajar, bermain, memanfaatkan waktu luang dan lain sebagainya. Taufik Hidayat (dalam www.kompasiana.com).

Secara umum permasalahan anak yang muncul di wilayah perkotaan terjadi tentu tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat baik yang dewasa maupun anak-anak. Dengan semakin majunya teknologi, tidak sedikit keterbukaan informasi melalui berbagai jejaring sosial membawa dampak negative terhadap perilaku masyarakat khususnya remaja dan anak-anak. Perilaku negative pada umumnya lebih mudah ditiru, seperti melakukan seks pranikah, kondisi ini pada akhirnya memicu terjadinya pernikahan dini (pernikahan pertama di bawah usia 18 tahun).

Salah satu indikator sebuah kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak adalah jika kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan di bawah 18 tahun rendah/mendekati nol, maka kabupaten/kota tersebut berhasil pada Program Wajar 12 Tahun, demikian juga apabila terjadi sebaliknya maka dapat dinyatakan pemangku kebijakan belum menjangkau misi yang terkait dengan kepentingan anak.

Upaya untuk mengantisipasi/mengurangi terjadinya pernikahan di bawah usia 18 tahun, yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah dibentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Keluarga Berencana, Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi pranikah dan atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran terutama orang tua, pemuka agama, dan pejabat publik yang menikahkan. Kendati telah dilakukan berbagai upaya, namun belum dapat dicapai data 0% atau dapat dikatakan masih tercatat adanya pernikahan di bawah usia 18 tahun. Berikut data yang terhimpun berdasarkan tempat/lembaga pencatatan.

**Tabel 4.7 Jumlah Anak yang Menikah di bawah Usia 18 tahun
Berdasarkan Tempat Pencatatan Tahun 2013 dan 2014**

Tempat	Jumlah yg menikah usia 9 – 16 th (2013)		Jumlah yg menikah usia 9 – 16 th (2014)	
	L	P	L	P
KUA	0	0	1	3
Catatan Sipil	0	0	19	34
Lembaga Adat	0	0	0	0
Pengadilan negeri	0	0	0	0
Pengadilan Agama	0	0	0	0
Total			20	37

Sumber : Kantor Urusan Agama dan Capil Kota Denpasar, 2014

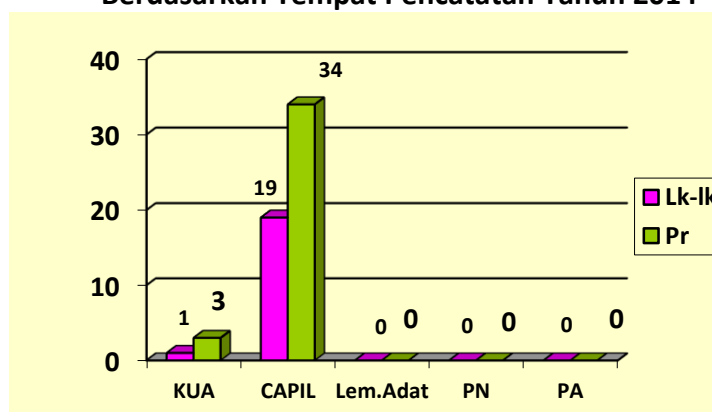
Tabel di atas menunjukkan masih terjadi perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun yang tercatat pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dilihat dari perspektif gender, tercatat jumlah perempuan yang lebih besar (64,9%) dibandingkan laki-laki (35,1%) pada kedua kantor pencatat tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Peraturan tersebut dapat diartikan bahwa di Indonesia seorang pria diperbolehkan menikah apabila telah berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Meskipun demikian dalam implementasinya masih harus ada persyaratan lain yang dipenuhi oleh calon pengantin. Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 mensyaratkan "apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tuanya". Ijin ini sifatnya wajib karena usia tersebut masih dipandang membutuhkan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali.

Apabila dilihat per kecamatan data **untuk tahun 2014 belum dapat dihimpun**, akan tetapi data tahun 2013 perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun masih terjadi di Kota Denpasar, tersebar di

empat kecamatan. Secara rinci data yang tercatat di keempat kecamatan seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar: 4.6 Jumlah Anak yang Menikah di bawah Usia 18 tahun Berdasarkan Tempat Pencatatan Tahun 2014



Sumber : Kantor Urusan Agama dan Capil Kota Denpasar, 2014

Diberlakukannya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sesungguhnya untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah usia 18 tahun bersifat responsive anak dan memberi perlindungan kepada anak-anak.

Agar kabupaten/kota siap menuju kota layak anak sudah saatnya orangtua, masyarakat, dan pemerintah bersama saling bersinergi menghapuskan pernikahan di bawah 18 tahun.

4.2.2 Lembaga Konsultasi Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi anak-anak sebagai penerus bangsa untuk mengembangkan kepribadian dan kualitas hidupnya. Sebagai tempat penyemaian nilai-nilai kepribadian bagi para anggotanya, keluarga seringkali mengalami perubahan baik struktur maupun fungsinya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang harus dihadapi seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis dan budaya (Kementrian Sosial RI- Lembaga Kegiatan Konsultai Keluarga, diunduh 27 Januari 2011).

Kadangkala perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan permasalahan. Untuk itu keluarga tersebut dapat memanfaatkan Lembaga Konsultasi Keluarga. Lembaga ini memberikan layanan konsultasi terkait dengan permasalahan keluarga yang tengah dihadapi, merawat dan mengasuh anak secara ramah, dan permasalahan keluarga yang lain. Selain dapat dimanfaatkan oleh orang tua, lembaga ini juga dapat dimanfaatkan oleh calon orang tua, juga pengasuh anak. Pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tumbuh kembang dan perlindungan anak dapat diperoleh dan dipelajari di lembaga ini.

Lembaga konsultasi tersebut antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Curhat, Lembaga Konsultasi Keluarga, dsb.

Di Kota Denpasar terdapat Lembaga Konsultasi Anak yang dapat diakses sebagai tempat berkonsultasi. Jumlah dan nama-nama lembaga konsultasi anak yang ada di Kota Denpasar tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Lembaga Konsultasi Anak di Kota Denpasar, Tahun 2014

Nama Lembaga Konsultasi anak	Jumlah
PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Kota Denpasar	1
KISARA (Kita Sayang Anak Remaja)	1
Forum Sayang Anak	1
LBH Bali	1
LBH Apik	1
P2TP2A Provinsi Bali	1
P2TP2A Kota Denpasar	1
LPA (Lembaga Perlindungan Anak)	1
Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus	1
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1
Bina Keluarga Balita	224 Klp
Bina Keluarga Remaja	34
Total Tahun 2014	268
Tahun 2013	242

Sumber: KBPP Kota Denpasar, 2014

Sedangkan untuk tahun 2014 data yang dapat dihimpun adalah data Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR), yang mengalami sedikit penurunan jumlah dirinci per kecamatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Jumlah Bina keluarga Balita (BKB) dan Bina keluarga Remaja (BKR) tahun 2014

Kecamatan	BKB	BKR
Denpasar Selatan	54	9
Denpasar Timur	54	7
Denpasar Barat	67	10
Denpasar Utara	49	8
Jumlah	224	34

Sumber : KBPP Kota Denpasar

Mencermati tabel di atas, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 198 Lembaga Konsultasi anak (BKB) yang tersedia di Kota Denpasar. Untuk tahun 2014 Bina Keluarga Balita (BKB) mengalami peningkatan jumlah sebesar 11,6% dibanding tahun 2013. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat Lembaga konsultasi ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat ketika sebuah keluarga mengalami permasalahan terhadap anaknya, baik permasalahan kesehatan maupun permasalahan sosial lainnya. Khusus lembaga Bina keluarga Balita (BKB) hampir ada di setiap kelurahan sebagai tempat pembinaan anak-anak balita yang ada di lingkungan wilayahnya. BKB ini selain sebagai pusat pembinaan kesehatan anak juga sekaligus berfungsi sebagai tempat konsultasi terkait persoalan anak-anak.

Sedangkan untuk jumlah BKR maupun lembaga konsultasi yang lain tidak mengalami perubahan jumlah. Lembaga lainnya seperti LPA, P2TP2A merupakan lembaga yang biasanya dipakai sebagai tempat keluarga berkonsultasi atau melaporkan apabila seseorang anak mengalami kasus pelecehan, kekerasan, perkosaan dan kasus-kasus lainnya. Lembaga ini selanjutnya akan memberikan saran atau

pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami kasus sehingga dia mendapat perlindungan.

4.2.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan NO 02 Tahun 2009 tentang program kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjamin bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang tidak mendapat perlindungan dan pengasuhan dari orang tuanya atau secara umum dapat dikatakan sebagai anak terlantar yang bisa terjadi karena ditinggalkan oleh orang tuanya.

Bagi anak-anak yang tidak dapat diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti, maka LKSA (**Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**) merupakan lembaga terakhir sebagai tempat pelayanan pengasuhan alternatif. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan anak, dimana lembaga ini ditangani oleh Dinas Sosial. Sebagai kota yang menuju Kota Layak Anak, harus menyediakan lembaga ini karena LKSA merupakan salah satu indikator yang harus dimiliki kota layak anak.

Di Kota Denpasar tercatat ada 30 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) pada tahun 2013, jumlah ini masih sama dengan jumlah yang ada pada tahun 2012, belum dapat ditampilkan perkembangan data untuk **tahun 2014 karena belum dapat dihimpun** demikian juga secara rinci belum diperoleh data nama maupun tempat di lembaga mana LKSA ini berada.

4.3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hidup sehat menjadi impian semua orang. Seseorang dinyatakan sehat tidak hanya dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya ada dalam keadaan baik, tetapi juga dilihat dari apakah orang tersebut dapat menerima dan diterima secara sosial oleh masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.

WHO (Suwiyo, 2002: 490) merumuskan kesehatan sebagai *a state of complete of physical, mental, social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity*. Artinya, sehat itu adalah keadaan fisik, mental, dan sosial seseorang secara utuh ada dalam kondisi baik dan tidak sekadar bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat besar peranannya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengimbangi makin ketatnya persaingan bebas pada era global ini. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan sudah menjadi prioritas bagi semua daerah untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Guna mengetahui kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Denpasar ada beberapa indikator yang dipakai sebagai tolok ukur sebagai berikut.

4.3.1 Jumlah Kelahiran

Dalam pencatatan data kependudukan, penambahan penduduk terjadi melalui adanya mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, penambahan penduduk juga terjadi melalui adanya kelahiran bayi. Kelahiran merupakan penambahan penduduk, yang

wajib dicatat dalam kartu keluarga maupun Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akte lahir.

Dalam siklus kehidupan manusia, kelahiran merupakan fase awal dari sebuah kehidupan, manusia yang baru lahir disebut sebagai bayi berumur 0 tahun pada saat kelahiran. Yang kemudian akan mendapatkan identitas baru sebagai manusia yang dilegalisasi melalui pencatatan pada akte kelahiran, yaitu pemberian nama, tanggal lahir dan semua identitas lain yang melekat pada dirinya.

Data tentang jumlah kelahiran di Kota Denpasar dapat dilihat pada table berikut: (data untuk tahun 2014 belum dapat dihimpun)

Tabel 4.10 Jumlah Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2011- 2013

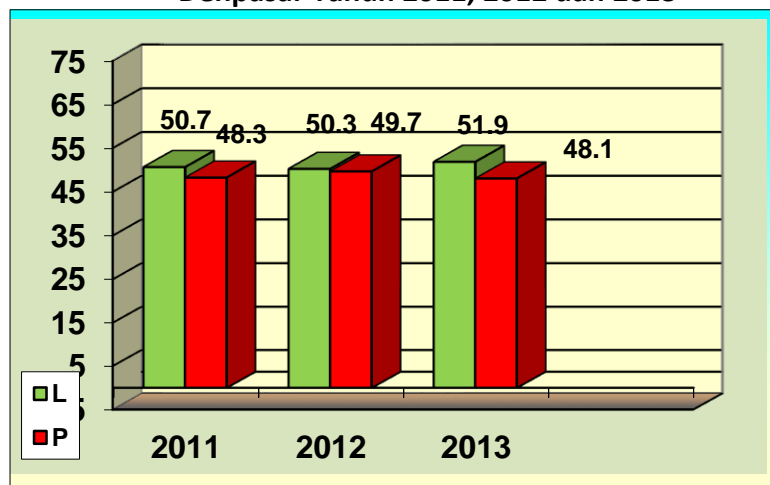
Tahun	Lk	Pr	Jumlah
2011	7.719	7.515	15.234
2012	8.423	8.331	16.754
2013	9.546	8.846	18.392

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menggambarkan dilihat dari perspektif gender, jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah bayi perempuan yang lahir pada tahun 2011 dan 2012 maupun 2013. Secara total (jumlah bayi laki-laki dan perempuan) terlihat terjadi peningkatan jumlah dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan meningkat lagi ke tahun 2013. Terjadinya peningkatan jumlah kelahiran ini kemungkinan dipengaruhi oleh bertambahnya pasangan rumah tangga baru atau kelahiran oleh ibu yang sudah memiliki putra lebih dari 2 anak. Apabila kelahiran dari ibu yang sudah memiliki putra lebih dari 2 anak, maka perlu menjadikan perhatian apakah program KB berjalan dengan baik. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentu memerlukan kajian lebih dalam lagi.

Jika dipersentasekan perbandingan jumlah kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 akan tampak seperti gambar berikut

Gambar: 4.7 Persentase Kelahiran Menurut jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2011, 2012 dan 2013



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2013

4.3.2 Kematian Bayi dan Balita

Dalam rangka pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selain perilaku hidup bersih dan sehat, maka perlu diketahui indikator derajat kesehatan yang lain yaitu melalui besarnya persentase angka kematian penduduk, ibu melahirkan, bayi dan balita. Masa bayi dan balita adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Oleh sebab itu kesehatan maupun asupan harus menjadi perhatian penting dari orang tuanya, karena masa ini sangat rentan terhadap berbagai penyakit baik yang ringan hingga penyakit yang dapat menyebabkan kematian.

Bagaimanapun masih ada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengurangi kematian bayi secara umum."Yang belum turun atau masih menghambat penurunan kematian anak adalah pada neonatus (bayi lahir sampai 28 hari) karena masih tetap pada angka 19 dari 1.000 kelahiran ibu (Pancho Kaslam dalam

<http://www.bbc.co.uk>).Tabel berikut menunjukkan jumlah angka kematian bayi per Puskesmas di Kota Denpasar.

Usia balita atau sering pula disebut usia prasekolah adalah dikategorikan pada usia 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun, sedangkan manusia yang baru lahir sampai usia 12 bulan disebut bayi (id.wikipedia.org/wiki /Bayi diakses taggal 18 Juli 2013).

Tabel berikut menggambarkan secara rinci jumlah kematian bayi dirinci per puskesmas yang ada di kota Denpasar.

Tabel 4.11 Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kota Denpasar Tahun 2014

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI - LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
		NEONATAL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATAL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA	NEONATAL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA
1	Puskesmas I Denpasar Barat	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Puskesmas II Denpasar Barat	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
3	Puskesmas I Denpasar Timur	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
4	Puskesmas II Denpasar Timur	0	1	1	2	1	1	0	1	1	2	1	3
5	Puskesmas I Denpasar Utara	1	2	0	2	0	0	0	0	1	2	0	2
6	Puskesmas II Denpasar Utara	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
7	Puskesmas III Denpasar Utara	2	2	1	3	0	0	0	0	2	2	1	3
8	Puskesmas I Denpasar Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Puskesmas II Denpasar Selatan	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2
10	Puskesmas III Denpasar Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Puskesmas IV Denpasar Selatan	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
	JUMLAH (KAB/KOTA)	6	9	3	12	2	2	1	3	8	11	4	15
	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	1	0.9	0.3	1.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.2	0.8
	Tahun 2013	=	9	0	9	=	0	2	2	=	9	2	11

Sumber: Bidang bina kesehatan masyarakat

Tabel di atas menggambarkan terjadi peningkatan jumlah kematian pada bayi (2 bayi), anak balita (2 anak), dan balita (4 anak) dari tahun 2013 ke tahun 2014, juga untuk tahun 2014 juga mencatat kematian neonatal sebanyak 8 orang. Peningkatan terbesar terjadi pada kematian anak balita dan balita dengan jenis kelamin laki-laki. Belum diketahui penyebab terjadinya, apakah karena bayi dan balita laki-laki lebih rentan terhadap penyakit atau ada factor penyebab lain diperlukan kajian lebih lanjut.

Selanjutnya dapat dijelaskan juga, untuk tahun 2014 tercatat kematian bayi neonatal. Kematian bayi dibagi menjadi dua, kematian neonatal (kematian di 27 hari pertama hidup), dan post-neonatal (setelah 27 hari). Dilihat dari perspektif gender, kematian neonatal pada jenis kelamin laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kematian neonatal pada jenis kelamin perempuan, dengan perbandingan 75% dibanding 25%. Untuk mengetahui factor penyebabnya perlu dilakukan kajian lebih jauh.

Jika dilihat data pada table di atas tampak bahwa di setiap puskesmas yang ada di semua kecamatan menunjukkan adanya data kematian bayi dan balita, kecuali di Puskesmas I Denpasar Selatan dan Puskesmas III Denpasar Selatan. Usia balita atau sering pula disebut usia prasekolah dikategorikan pada usia 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun, sedangkan manusia yang baru lahir sampai usia 12 bulan disebut bayi ([id.wikipedia.org/wiki /Bayi](http://id.wikipedia.org/wiki/Bayi) diakses tanggal 18 Juli 2013). Secara kuantitatif angka kematian bayi dan balita terbanyak ada di Puskesmas II Denpasar Timur dan Puskesmas III Denpasar Utara.

Secara keseluruhan angka kematian balita di Kota Denpasar pada tahun 2014 mencapai 38 orang bayi dan balita. Jika dibandingkan dengan angka kematian bayi tahun 2013, yang jumlahnya sebanyak 22 bayi dan balita, tampaknya tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah AKB yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan program penanggulangan AKB yang dilakukan di Kota Denpasar belum cukup

berhasil. Dalam konteks ini program PKK memegang peranan yang sangat penting. Program-program PKK seperti Posyandu, gerakan sayang ibu (GSI) tentu sangat membantu meningkatkan kesehatan bayi dan anak balita di Kota Denpasar.

Pada tingkat global, seperti disebutkan dalam laporan *Save The Children*, sekitar 1 juta bayi meninggal ketika baru berusia satu hari. Badan ini juga menegaskan bahwa sebagian besar kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah jika tenaga kesehatan yang terlatih hadir saat kelahiran tersebut (<http://www.bbc.co.uk>).

Salah satu penyebab penurunan kematian bayi tersebut adalah kehadiran tenaga kesehatan yang terlatih saat kelahiran yang mencapai 73% di Indonesia. Selain itu prakarsa untuk menempatkan bidan di kawasan pedesaan yang diikuti dengan pelatihan bidan juga mendorong penurunan kematian bayi (<http://www.bbc.co.uk>).

4.3.3 Pemberian ASI Eksklusif

Program pemberian Asi eksklusif telah, sedang dan terus disosialisasikan secara intensif kepada ibu-ibu menyusui, karena telah terbukti bahwa Asi eksklusif dapat membuat daya tahan tubuh anak lebih baik dan memberi kontribusi penting dalam pembentukan sel-sel tubuh anak yang sedang mengalami pertumbuhan, kebaikan yang lain adalah para ibu juga merasakan kedekatan bathin pada saat memberikan ASI pada bayinya. Menurut para pakar kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu (ASI). Pemberian ASI Eksklusif adalah apabila seorang bayi mendapatkan makanan murni dari air susu ibunya selama 6 bulan penuh tanpa ada makanan atau minuman tambahan.

Secara ekonomi pemberian Asi jauh lebih praktis dan murah bila dibandingkan dengan susu formula. Karena harga susu formula relatif mahal bagi sebagian warga masyarakat. Oleh karena itu, pemberian Asi eksklusif dianjurkan kepada ibu menyusui

Diharapkan kepada tenaga medis maupun para penggiat lainnya, untuk bekerja lebih keras mensosialisasikan kepada ibu menyusui dan keluarganya mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian pemberian ASI eksklusif dapat lebih ditingkatkan dan kesehatan anak (Balita) diharapkan pula menjadi lebih baik.

Menurut para pakar kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu (ASI). Banyak kelebihan yang terkandung dalam ASI yang mendorong bayi dapat tumbuh kembang dengan lebih sempurna dibandingkan makanan lainnya. Setelah bayi berusia 6 bulan, mereka kemudian baru diberikan MPASI (Makanan Pendamping ASI). Namun demikian masih banyak ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi para ibu menyusui di Kota Denpasar memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.12 Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Bayi			Asi Eksklusif		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Denpasar Barat	146	122	268	92	89	181
2	Denpasar Timur	221	199	420	161	151	312
3	Denpasar Utara	341	378	719	254	272	526
4	Denpasar Selatan	333	326	659	245	251	496
	Jumlah	1041	1025	2066	752	763	1515

Sumber : KBPP Kota Denpasar

Tabel: 4.13 Persentase Cakupan ASI Eksklusif berdasarkan kecamatan Tahun 2013 dan 2014

Kecamatan	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)
Denpasar Utara	71,98	73,15
Denpasar Timur	71,24	74,28
Denpasar Selatan	72,73	75,26
Denpasar Barat	64,68	67,53

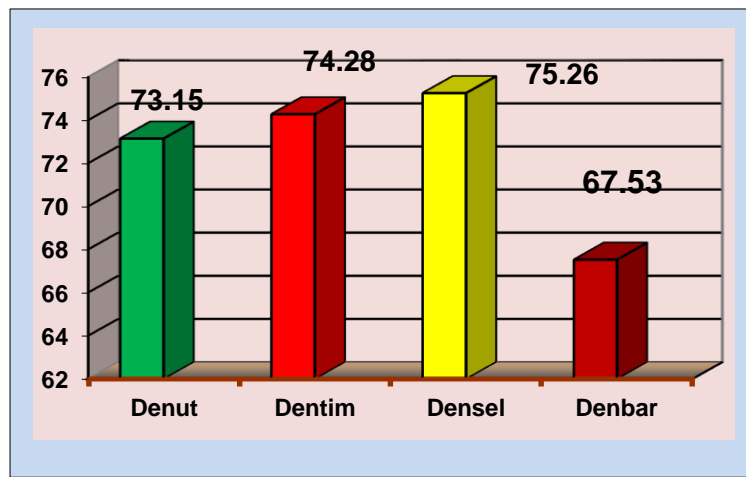
Sumber: Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Diskes Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menunjukkan terjadinya peningkatan persentase cakupan ASI eksklusif di semua kecamatan di Kota Denpasar dari tahun 2013 ke tahun 2014. Baik untuk tahun 2013 maupun 2014 tampak bahwa persentase tertinggi adalah di Kecamatan Denpasar Selatan yang sudah mencapai 75,26%, sementara yang terendah ada di Kecamatan Denpasar Barat. Penyebab pasti terjadinya hal ini belum diketahui karena untuk mencari jawabannya perlu dilakukan kajian lebih dalam. Dapat dikatakan bahwa persentase pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar dapat dikatakan sudah relative tinggi karena sudah lebih dari 50%. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat semakin meningkatnya kesadaran ibu-ibu untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya meskipun belakangan ini partisipasi perempuan ibu rumah tangga sudah semakin sibuk berperan di ranah public sebagai pencari nafkah. Hal ini juga tidak terlepas dari peran serta unsur-unsur masyarakat terkait seperti, PKK, Konselor Laktasi, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) yang mempunyai cabang di berbagai kota dan unsur-unsur lain yang terkait.

Berdasarkan asumsi sementara tinggi rendahnya persentase pemberian ASI eksklusif cenderung dipengaruhi oleh beberapa factor seperti: kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemberian ASI eksklusif, kesibukan orang tua (ibu-ibu) bekerja di luar rumah dengan waktu kerja yang panjang dan ketat dan kurang tersedianya fasilitas pojok laktasi di tempat kerja yang mempekerjakan karyawan yang sedang menyusui. Untuk ini perlu lebih disosialisasikan lagi program pemberian ASI pada masyarakat .

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka persentase pemberian ASI eksklusif per kecamatan akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 4.8 Cakupan ASI Eksklusif Di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2014



4.3.4 Status Gizi Balita

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang patut diperhatikan menyangkut status gizi Balita. Status gizi balita yang terbagi menjadi dua kriteria (penggolongan) (status gizi baik dan status gizi buruk) menjadi indikasi apakah balita masuk dalam status kecukupan gizi atau tidak, Semakin baik status gizi seorang anak, maka tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut semakin baik pula. Sebaliknya, apabila asupan gizi anak tidak terpenuhi atau tidak memenuhi angka kecukupan gizi, maka pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak menjadi terganggu, sehingga dengan demikian akan mudah bagi kader penggerak untuk membantu penanganannya.

Melihat angka pemberian ASI eksklusif sudah relatif tinggi, hal ini tampaknya ada korelasi dengan status gizi anak yang ada di Kota Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita. Tabel berikut menunjukkan kondisi status gizi balita di Kota Denpasar.

Tabel 4.14 Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Gizi Lebih Tahun 2014

Kecamatan	Gizi Kurang			Gizi Buruk			Gizi Lebih		
	L	P	Juml	L	P	Juml	L	P	Juml
Denpasar Barat	17	14	31	6	4	10	28	11	39
Denpasar Timur	15	15	30	3	5	8	33	23	56
Denpasar Utara	14	21	35	2	4	6	8	10	18
Denpasar Selatan	10	16	26	3	3	6	23	17	40
Jumlah	56	66	122	14	16	30	92	61	153

Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Diskes Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menggambarkan cukup banyak jumlah balita yang kekurangan gizi. Kecamatan Denpasar Utara mencatat jumlah terbesar untuk status kekurangan gizi balita, sedangkan di tiga kecamatan yang lain mencatat jumlah yang hamper sama. Untuk status gizi buruk tercatat jumlah yang tidak begitu banyak. Angka ini diharapkan bisa diperkecil lagi sehingga tidak ada lagi balita yang mengalami kekurangan gizi maupun gizi buruk. Untuk itu para pemeran serta diharapkan mampu mewujudkannya dengan cara mengimplementasikan program-program yang relevan. Kondisi yang menggembirakan tercatat angka jumlah balita pada kondisi gizi lebih yang terbanyak, dibanding jumlah balita dengan status kurang gizi dan gizi buruk. Kecamatan Denpasar Timur mencatat jumlah terbanyak untuk status gizi lebih balita.

Lebih jauh apabila dicermati table di atas, dari perspektif gender pada status kurang gizi balita perempuan tercatat lebih banyak jumlahnya (54,10 %) dibanding balita laki-laki (45,9 %). Demikian juga untuk status gizi buruk, jumlah balita perempuan tercatat lebih banyak dibanding balita laki-laki. Kondisi sebaliknya tercatat untuk status gizi lebih balita laki-laki tercatat lebih banyak jumlahnya (60,13%) dibanding balita perempuan yang besarnya 39,87%. Perlu dikaji lebih jauh penyebab terjadinya kondisi tersebut.

4.3.5 Pojok ASI

Maraknya pasar kerja yang semakin dipenuhi oleh para wanita lajang maupun yang sudah berkeluarga adalah disebabkan oleh tuntutan ekonomi yang semakin kuat, alasan lain adalah kebutuhan pengakuan eksistensi mereka. Bagi wanita yang bekerja sementara masih menyusui bayinya, dewasa ini sudah tidak banyak mengalami kendala. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan fasilitas penyimpanan ASI yang tidak langsung dikonsumsi oleh bayinya, hal ini dapat diadakan di rumah ataupun di tempat kerja. Bagi ibu-ibu yang akan menyusui langsung bayinya, di beberapa tempat kerja maupun di tempat-tempat public sudah menyediakan tempat-tempat dimaksud yang disebut dengan POJOK ASI (Laktasi). Pembangunan Pojok ASI (Laktasi) menjadi prioritas dalam pembangunan .(<http://m.detik.com/news>, diakses tgl 18 Juli 2013).

Ketersediaan Pojok ASI memberi kenyamanan bagi ibu-ibu untuk menyusui dan atau memeras air susu. Sehingga pengadaan ruang laktasi atau Pojok ASI merupakan suatu hal yang sangat urgen di tempat-tempat publik. Berikut gambaran jumlah dan lokasi Pojok ASI di tempat-tempat publik di Kota Denpasar.

Tabel 4.15 Pojok Asi di Kota Denpasar Tahun 2013 dan 2014

Jenis Tempat	2013	2014
Instansi Pemerintah	4	33
Instansi Swasta	16	16
Bandara Ngurah Rai	1	1
Puskesmas	11	11
Pusat pembelian	1 (Tiara Dewata)	1 (Tiara Dewata)
Pasar Tradisional	2 (Pasar Badung dan Pasar Agung)	2 (Pasar Badung dan Pasar Agung)
Stasiun	1 (di Ubung)	1 (di Ubung)

Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Diskes Kota Denpasar

Mencermati table di atas catatan yang cukup menggembirakan yaitu tersedianya pojok ASI di area public seperti bandara, pusat pembelanjaan, stasiun bahkan di pasar tradisional. Sehingga tidak perlu menjadikan alasan untuk tidak memberikan ASI nya bagi ibu-ibu yang harus bekerja. Ketersediaan Pojok ASI di Puskesmas sekitar Denpasar yang berjumlah 11 buah. Yang cukup menggembirakan adalah ketersediaan Pojok ASI di pasar tradisional (2 buah masing-masing di Pasar Agung dan Pasar Badung), dengan kondisi ini sangat memungkinkan ibu-ibu menyusui yang harus mengadakan kebutuhan rumah tangga tetapi tetap harus membawa bayi mereka dapat menyusui dengan aman dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar menuju Kota Layak Anak, pemerintah kota Denpasar telah menganjurkan pada setiap instansi pemerintah agar menyediakan pojok ASI. Oleh karena itu pada tahun 2014 keberadaan pojok ASI di instansi pemerintah jumlahnya meningkat drastis bila dibandingkan tahun 2013. Hal ini juga sebagai salah satu komponen yang dapat mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Ramah Anak.

4.3.6 Imunisasi

Upaya untuk menanggulangi dan mencegah penyakit pada bayi maupun wanita usia subur, telah banyak telah banyak diupayakan oleh pemerintah melalui imunisasi, baik secara rutin maupun melalui gebrakan-gebrakan. Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan serum ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi di antaranya adalah hepatitis B, campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, gondongan, cacar air, tbc, dan sebagainya (www.organisasi.org - Kesehatan, diakses tanggal 19 Juli 2013).

Adapun tujuan program imunisasi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Bayi dan balita masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit, sistem kekebalan tubuh mereka belum terbentuk sempurna, oleh karenanya pemberian imunisasi perlu dilakukan secara efektif pada bayi dan balita, kemudian diberikan pengulangan pada usia awal sekolah dasar. Untuk itu pemerintah secara terus menerus mensosialisasikan pentingnya kesadaran terhadap kesehatan khususnya pemberian vaksinasi.

Pemberian imunisasi untuk masyarakat dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, posyandu, dan praktek dokter swasta. Tabel berikut menggambarkan persentase bayi di Kota Denpasar yang telah mendapat beberapa jenis imunisasi.

**Tabel 4.16 Persentase Imunisasi pada Balita di Kota Denpasar
Tahun 2012- 2014**

Jenis Imunisasi	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
HBO (0 – 7 hari)	97,2%	98,7%	95 %
BCG	110,0%	110,5%	95%
POLIO 1	109,7%	110,6%	101%
DPT/HB (1)	109,9%	111,2%	100%
POLIO 2	97,3%	99,4%	106,9%

Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menggambarkan adanya penurunan persentase imunisasi pada balita di Kota Denpasar pada tahun 2014 dibanding dua tahun sebelumnya, kecuali pada imunisasi Polio2 mengalami peningkatan. Dicermati lebih jauh tabel di atas juga menggambarkan hampir seratus persen (semua) bayi di kota Denpasar sudah mendapatkan kelima imunisasi dasar yaitu HBO, BCG, Polio 1,

DPT/HB, dan Polio 2. Kondisi ini menggambarkan tingkat kesadaran dan partisipasi ibu-ibu di Kota Denpasar sudah semakin tinggi.

Imunisasi hepatitis HB O bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif kepada bayi dan balita terhadap penyakit yang disebabkan oleh hepatitis B. Imunisasi BCG bertujuan memberikan kekebalan aktif kepada tubuh terhadap penyakit TBC dan paru-paru. Imunisasi Polio bertujuan memberikan kekebalan aktif terhadap tubuh terhadap penyakit *poliomyelitis* atau kelumpuhan. Sedangkan imunisasi DPT/HB bertujuan memberi kekebalan aktif secara bersamaan kepada tubuh terhadap penyakit hepatitis B, difteri, pertusis, dan tetanus (p2ppaluta.blogspot.com/jadwal-vaksin, diakses tanggal 19 Juli 2013).

Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan Universal Child Immunization (UCI) yang dicapai oleh suatu wilayah. Apabila cakupan imunisasi suatu wilayah mencapai lebih dari 80% (minimal 80%) sasaran mendapat imunisasi lengkap maka dikatakan telah tercapai UCI. Seperti telah ditunjukkan dalam tabel di atas, seluruh jenis imunisasi yang telah diberikan menunjukkan persentase >80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Denpasar telah mencapai UCI, karena telah mencapai 100% kecuali imunisasi jenis HB O dan BCG. Balita yang mendapatkan imunisasi HBO dan BCG jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Balita yang telah mendapat jenis imunisasi lainnya. Hal ini perlu diketahui akar persoalannya, agar dapat dicarikan jalan ke luar.

4.3.7 Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Reproduksi dan Mental

Pendampingan orang tua terhadap anak-anak remaja harus dilakukan secara terus menerus, dan perkembangan kehidupan mereka menjadi perhatian utama. Hal ini perlu dilakukan karena kelompok usia ini sangat labil terhadap pengaruh pergaulan yang negatif. Selain pendampingan dari orang tua, di sekolah maupun di

luar jam belajar sekolah juga perlu diberikan wadah untuk menampung permasalahan yang mereka hadapi, seperti keberadaan Lembaga layanan reproduksi dan mental. Lembaga penyedia layanan kesehatan Reproduksi dan mental ini berguna sebagai tempat konsultasi, informasi, edukasi, berbagai permasalahan yang dihadapi serta sebagai tempat mengembangkan bakat dan minat remaja. Tabel berikut menggambarkan lembaga penyedia layanan reproduksi dan mental yang tercatat di kota Denpasar tahun 2012 – 2014.

Tabel 4.14 Lembaga Penyediaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental di Denpasar Tahun 2012 - 2014

Jenis Layanan	2012	2013	2014
PIK Remaja/Mahasiswa	19	21	23
Pusat Konsultasi Psikologi	10	12	13
Rumah Sakit sanglah	1	1	1
Fakultas Kedokteran Unud	1	1	1
Bimbingan Konseling			
- SMP	32	36	36
- SMA/K	30	31	31
Jumlah	93	102	105

Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi di Kota Denpasar yang cukup besar. Hal yang menggembirakan adalah ketersediaannya di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK, dan jumlahnya meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013. Idealnya setiap sekolah seharusnya memiliki lembaga ini mengingat sekolah adalah lembaga pendidikan yang setiap hari menangani dan berhadapan langsung dengan ratusan remaja. Bimbingan konseling memberikan bantuan (*process of helping*) kepada siswa agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma (agama dan budaya) sehingga kedepan terbentuk SDM yang berkualitas. Fungsi bimbingan dan konseling secara kuratif

adalah membantu para peserta didik agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya (pribadi, sosial, belajar, atau karir).

Lebih jauh mencermati tabel di atas, menjelaskan ketersediaan PIK (Pusat Informasi Kesehatan), Pusat Konsultasi Psikologi yang cukup besar jumlahnya walaupun rasio keberadaannya kemungkinan belum dapat menampung jumlah anak-anak remaja di Kota Denpasar apabila pemanfaatannya dilakukan oleh semua remaja yang ada secara maksimal. Rumah sakit Sanglah maupun Fakultas Kedokteran Unud juga menunjukkan partisipasinya dalam menunjang kebutuhan remaja di Kota Denpasar, dalam hal pusat layanan kesehatan reproduksi dan mental.

PIK (Pusat Informasi Kesehatan) merupakan sebuah wadah sarana komunikasi yang bertujuan membentuk remaja sehat, baik fisik maupun mental, agar segala apa yang dilakukannya disertai tanggung jawab. Di dalam wadah ini (PIK) selain menangani minat dan bakat remaja/mahasiswa, juga menangani kesehatan reproduksi, KIE (konsultasi, informasi, dan edukasi).

Kedepan perlu sosialisasi keberadaan dan manfaat dari lembaga-lembaga ini, agar pemanfaatan lembaga-lembaga yang telah tersedia dapat dimanfaatkan lebih efektif.

4.3.8 Jumlah Keluarga Miskin

Faktor kemiskinan merupakan salah satu pemicu munculnya gelandangan dan pengemis. Kriteria miskin yang mengacu pada kriteria dari BKKBN adalah dalam sehari makan kurang dari 3x, penghasilan tidak tetap, tidak mempunyai sawah atau tegalan, rumah sederhana dari *gedeg* (bilik bambu) ukuran 6 x 4 meter persegi dan berlantai tanah, termasuk dalam kriteria itu para jompo, manula dan para janda ditinggal mati suaminya (Sri Widowati Sugih Hastuti, 2003). Salah satu factor penyebab kemiskinan adalah kurangnya

pendapatan yang merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja.

Seseorang disebut miskin dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu dalam sehari makan kurang dari 3x, penghasilan tidak tetap, tidak mempunyai sawah atau tegalan, rumah sederhana dari *gedeg* (bilik bambu) ukuran 6 x 4 meter persegi dan berlantai tanah, termasuk dalam kriteria itu para jompo, manula dan para janda ditinggal mati suaminya. (Sri Widowati Sugih Hastuti, 2003).Kriteria miskin tersebut mengacu pada kriteria miskin dari BKKBN yang biasa melakukan pendataan setiap tahun. Data jumlah keluarga miskin untuk tahun 2014 belum dapat dihimpun.

4.4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup.Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat dan keluarga. Program pembangunan pendidikan di Indonesia bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas SDM nya. Tujuan dari pendidikan juga untuk menggali potensi khas dan unik yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga peserta didik haruslah diperlakukan sebagai subjek.Dengan demikian pendidikan tidak menjadi beban bagi peserta didik melainkan diminati dan disenangi.

Komitmen *Millenium Development Goals* (MDG) yang terkait dengan bidang pendidikan tercantum pada *Goals* ke 2 yakni mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Pengertian pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan

memperluas wawasan. Untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas penduduk dengan sendirinya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Terdapat 3 (tiga) kategori lembaga yang menangani pendidikan di Indonesia, yaitu lembaga forma (sekolah), non formal (LPTK, paket belajar), dan lembaga informal (lembaga sosial tradisional seperti: surau). Ketiga lembaga ini diharapkan dapat bersinergi untuk menghasilkan produk, yaitu manusia yang berkualitas, manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam tulisan ini pendidikan yang dimaksud lebih diarahkan untuk menganalisis pendidikan formal persekolahan. Guna mengetahui kualitas dunia pendidikan di Kota Denpasar, ada beberapa indicator penting yaitu APK, APM dan APS yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 APS, APK dan APM Pada Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2014

Jenjang Pendidikan	APS			APK			APM		
	L	P	Juml	L	P	Rata	L	P	Juml
SD/MI/Paket A	43.590	40.580	84.170	102,56	102,27	102,42	86,76	86,44	86,60
SMP/MTs/Paket B	18.204	17.164	35.368	126,12	113,11	113,11	95,50	97,87	96,69
SMA/MA/Paket C	8.706	9.172	17.878	107,66	97,91	97,91	37,97	38,87	38,42

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar 2013/2014

4. 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indicator untuk melihat partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan adalah dengan melihat Angka Partisipasi Kasar (APK). Deffinisi Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan adalah proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok umur tersebut, Sebagai gambaran APK SD dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100. sehingga APK melihat

penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia mereka.

Berikut ini akan disajikan APK di Kota Denpasar mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Angka yang tersaji pada tabel di bawah data untuk tahun 2013 belum termasuk data jenjang pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C.

Tabel 4.19. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun 2013/2014

Pendidikan	2013/2014
SD + MI	111,14
SMP + MTs	107,53
SM + MA	107,34

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2013/2014

4.4.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD, SMP dan SMA

Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Angka partisipasi kasar (APK) rata-rata tidak dirinci per kecamatan, yang menunjukkan angka di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mendukung anak-anak mereka belajar di bangku sekolah dasar dan MI cukup menggembirakan walaupun masih pada taraf Sekolah Dasar, oleh karenanya AngkaPartisipasi Kasar Sekolah Dasar sangat tinggi.

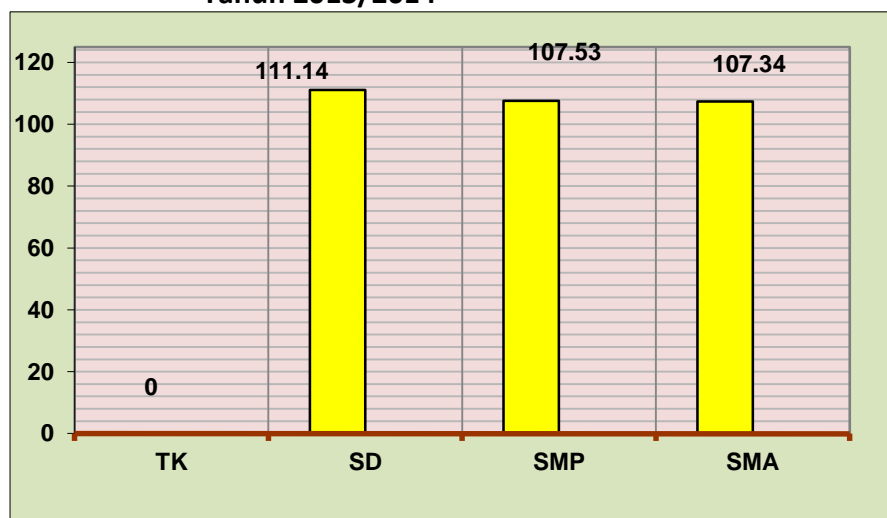
Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SMP dan MTs tidak berbeda jauh dengan APK jenjang pendidikan SD, walaupun angkanya lebih rendah akan tetapi masih tercatat di atas 100%. Demikian juga APK pada jenjang pendidikan SMA dan MA, masih menunjukkan angka di atas 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah anak-anak yang duduk di jenjang pendidikan SMP dan SMA

semakin sedikit yang umurnya melebihi usia siswa SMP dan SMA yang seharusnya. Lebih jauh hal ini mengindikasikan siswa yang mengulang kelas pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA tidak banyak.

Apabila ditelaah lebih jauh, pada ketiga jenjang pendidikan, maka jenjang pendidikan tertinggi yaitu SMA/MA menunjukkan angka yang paling rendah, walaupun selisih diantara ketiganya sangat kecil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah biaya pendidikan yang kurang terjangkau untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau kurang memadainya jumlah sekolah setingkat SMA, kemungkinan lain banyak siswa yang kemudian masuk ke sekolah-sekolah di luar Denpasar. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota Denpasar dalam menyusun rencana pengembangan pendidikan di tahun-tahun mendatang.

Jika digambarkan secara umum perbandingan APK untuk masing-masing jenjang pendidikan padatahun 2013 dapat dilihat seperti pada grafik berikut ini.

Gambar: 4.9 Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2013/2014



Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

4.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya (Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan). APM digunakan untuk melihat angka partisipasi sekolah anak, yaitu anak usia sekolah bersekolah tepat waktu sesuai dengan umur mereka. APM memberikan penekanan kepada ketepatan usia seseorang dengan jenjang pendidikan yang dijalani. Sebagai gambaran siswa SD berumur 7-12 tahun, Untuk menghitung APM digunakan cara, misalnya menghitung APM SD: jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah di Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dikalikan 100. Jika persentase APM menunjukkan 100% berarti tidak ada siswa yang mengulang kelas atau masuk pada usia yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan.

Tabel 4.20 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan di Kota Denpasar,2013/2014

Pendidikan	2013/2014
SD + MI	92,18
SMP + MTs	77,12
SM + MA	74,71

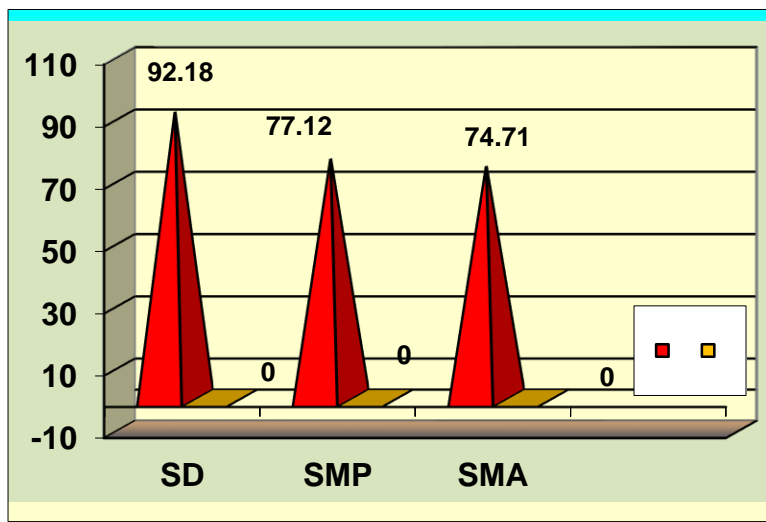
Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar,2013/2014

4.4.2.1. APM Tingkat SD, SMP dan SMA

APM adalah salah satu indikator yang penting Untuk mengetahui tingkat kualitas penduduk, karena siswa yang masuk pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, Atau SMA) sudah sesuai dengan usianya, atau anak usia sekolah bersekolah tepat waktu sesuai dengan umur mereka. Tabel di atas menunjukkan pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA dan sederajat mencatat angka di bawah 100%.Kondisi ini menjelaskan bahwa tidak semua anak usia sekolah bersekolah tepat waktu sesuai dengan umur mereka.

Semakin tinggi jenjang pendidikan tercatat pada table di atas semakin kecil Angka Partisipasi Murni nya. Angka terkecil adalah pada jenjang pendidikan SMA/MA. Faktor penyebab rendahnya APM di jenjang pendidikan SMA/MA ini, kemungkinan karena banyak anak yang mengulang kelas di jenjang ini, atau adanya factor penyebab yang lain, seperti semakin mahalnya biaya pendidikan. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas tentu memerlukan kajian yang khusus.

Grafik: 4.10 Persentase Angka Partisipasi Murni SD,SMP, SMA dan Sejenis di Kota Denpasar Tahun 2013/2014



Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

4.4.3 Siswa Mengulang Kelas

Mutu pendidikan, antara lain dapat diukur dari angka siswa yang mengulang kelas. Tinggi rendahnya persentase siswa mengulang kelas juga menandakan baik buruknya kualitas sumberdaya manusia. Semakin kecil persentase siswa yang mengulang kelas berarti menunjukkan siswa-siswa tersebut semakin pintar. Kondisi sebaliknya semakin tinggi persentase siswa yang mengulang kelas menunjukkan banyak anak yang kualitas pendidikannya rendah. Oleh karenanya

tingkat angka siswa mengulang kelas merupakan salah satu tolok ukur bagaimana kualitas pendidikan siswa kita.

Angka menulang kelas biasanya banyak terjadi pada siswa dengan jenjang pendidikan dasar. Faktor –faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain karena masih labilnya siswa-siswa pada jenjang pendidikan dasar sehingga mudah terpengaruh oleh kondisi hiburan, kesenangan bermain, kurangnya kontrol lingkungan keluarga, merebaknya arus perkembangan teknologi informasi dan pengaruh banyak faktor sehingga menjadikan siswa-siswa pada usia sekolah dasar terlena sehingga lupa belajar. Kondisi ini yang memicu prestasi siswa di sekolah menurun, tidak jarang siswa memperoleh nilai jelek sehingga tidak naik kelas dan mereka harus mengulang kelas yang sama. Guna mengetahui luaran pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang diukur dari data mengulang kelas untuk tahun 2013/2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21 Jumlah Siswa Mengulang menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2013/2014

Kecamatan	SD			SMP			SMA		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Den.Selatan	6	7	13	0	0	0	1	4	5
Den. Timur	11	10	21	0	0	0	1	0	1
Den. Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Den. Utara	0	0	0	0	0	0	40	69	109
Jumlah 2013	17	17	34	0	0	0	41	73	114

Sumber: Profil pendidikan Kota Denpasar, 2013/2014

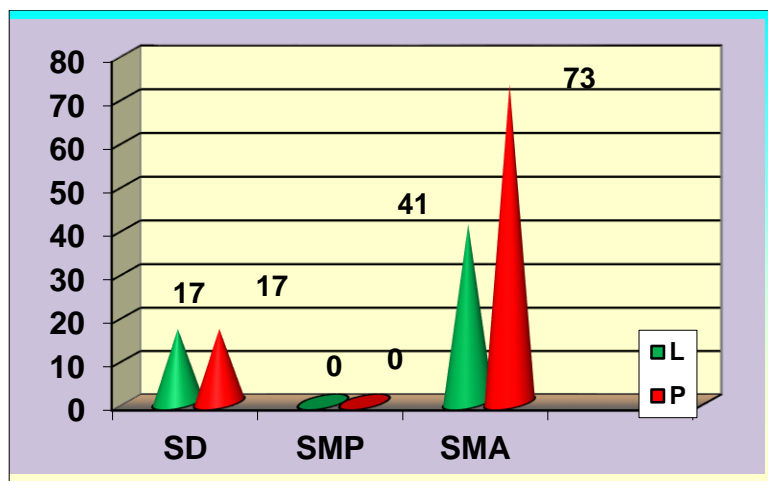
Tabel di atas menunjukkan adanya siswa mengulang kelas di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD dengan jumlah sebesar 34 siswa, angka tersebut tercatat pada Kecamatan Denpasar Timur (61,76%) dan Denpasar Selatan mencatat angka sebesar (38,24%). Apabila dilihat dari perspektif gender tidak terlihat adanya bias gender. Sedangkan pada dua kecamatan yang lain tidak tercatat siswa mengulang kelas pada jenjang pendidikan ini.

Mencermati lebih lanjut table di atas, pada jenjang pendidikan SMA di Kota Denpasar tercatat angka siswa mengulang kelas yang fantastis yaitu sebesar 114 siswa mengulang kelas. Kondisi ini didominasi oleh siswa Kecamatan Denpasar Utara yaitu sebesar 95,6% dari total siswa mengulang kelas di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SMA. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini kemungkinan dipicu oleh faktor sosial, dimana siswa SMA umumnya berada pada kelompok usia yang cukup labil terhadap pengaruh dari luar, sehingga mereka melalaikan belajarnya atau kurang bertanggung jawab pada kegiatan utamanya yaitu belajar. Untuk ini diperlukan kajian lebih jauh, sehingga kedepan jumlah siswa mengulang kelas dapat lebih diperkecil. Pada Kecamatan Denpasar Barat tidak tercatat angka siswa mengulang kelas pada jenjang pendidikan SMA. Apabila dilihat dari perspektif gender, dari total siswa mengulang kelas di Kecamatan Denpasar Utara 63% nya adalah siswa perempuan (siswi). Untuk ini perlu dikaji lebih jauh faktor penyebab terjadinya, apakah siswa laki-laki berarti lebih pintar dan atau lebih serius menjalani pendidikan dibandingkan siswa perempuan.

Kondisi yang membanggakan apabila mencermati jenjang pendidikan SMP pada table di atas, karena tidak terdapat siswa mengulang kelas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kualitas siswa SMP di Kota Denpasar adalah bagus.

Secara umum siswa mengulang kelas di SD, SMP, dan SMA adalah sebagai tercermin pada grafik berikut ini.

Gambar: 4.11 Jumlah Siswa Mengulang Kelas menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2013/2014



Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

4.4.4 Siswa Putus Sekolah (Drop Out)

Putus sekolah dimaksudkan adalah kondisi dimana penduduk tidak menyelesaikan pendidikannya dikarenakan berbagai faktor penyebab, baik di jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah dan lanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka putus sekolah, antara lain disebabkan karena, (1) faktor sosial yaitu rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, (2) faktor ekonomi yaitu kondisi kemiskinan penduduk yang masih relatif menonjol, (3) juga faktor geografis yang sulit terjangkau dan berjarak jauh (seperti daerah pegunungan, daerah pedalaman). Seringkali faktor-faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya putus sekolah.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah mengurangi kondisi tersebut telah banyak dilakukan, antara lain program pemberian dana BOS, beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah maupun swasta, dan program wajib belajar 9 tahun dimana siswa difasilitasi dengan dibebaskannya biaya pendidikan. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan

agar dapat mengurangi angka putus sekolah siswa terutama di tingkat sekolah dasar. Namun demikian masih tercatat adanya siswa putus sekolah pada tingkat SD dan SMP di Kota Denpasar, seperti terlihat pada table berikut.

Tabel 4.22 Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013/2014

Jenjang Pendidikan	Jumlah Putus Sekolah		
	L	P	Jumlah
SD/MI	6	3	9
SMP/MTs	6	7	13
SMA/MA	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

Secara rinci jumlah siswa putus sekolah perkecamatan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4.23 Jumlah siswa SD Putus Sekolah menurut Kecamatan di Kota Denpasar

Kecamatan	2013/2014		
	L	P	Jumlah
Denpasar Selatan	0	0	0
Denpasar Timur	5	0	5
Denpasar Barat	0	2	2
Denpasar Utara	1	1	2
Jumlah	6	3	9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

Tabel di atas menunjukkan di Kecamatan Denpasar Selatan sudah tidak terdapat siswa putus sekolah. Keadaan yang paling menonjol terjadi siswa putus sekolah di Kecamatan Denpasar Timur tercatat sebanyak 5(lima) siswa. Lebih lanjut dilihat dari perspektif gender, siswa putus sekolah di Kecamatan Denpasar Timur didominasi oleh siswa laki-laki. Secara total untuk empat kecamatan di Kota

Denpasar, siswa laki-laki mendominasi jumlah siswa putus sekolah yaitu sebesar 66,67% dari siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD. Walaupun angka yang tercatat tidak menunjukkan cukup besar, akan tetapi tetap perlu mendapat perhatian agar pada tahun-tahun berikutnya bisa diminimalisir.

Tabel 4.24 Jumlah siswa SMP Putus Sekolah menurut Kecamatan di Kota Denpasar 2013/2014

Kecamatan	2013/2014		
	L	P	Jumlah
Denpasar Selatan	0	0	0
Denpasar Timur	0	0	0
Denpasar Barat	2	2	4
Denpasar Utara	4	5	9
Jumlah	6	7	13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

Tabel di atas menunjukkan Kecamatan Denpasar Utara mencatat siswa putus sekolah yang relative besar yaitu sebesar 69,2% dari jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP di Kota Denpasar, hal ini perlu menjadikan perhatian bagi instansi berwenang untuk mengkaji apa yang menjadi penyebabnya. Kondisi sebaliknya pada dua kecamatan: Denpasar Selatan dan Timur, tidak terdapat siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan ini. Dilihat dari perspektif gender, secara total jumlah siswa putus sekolah untuk Kota Denpasar tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP tercatat lebih besar disbanding siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD. Sementara untuk jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.25 Jumlah Siswa SMA Putus Sekolah menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2013/2014

Kecamatan	2013/2014		
	L	P	Jumlah
Denpasar Selatan	0	0	0
Denpasar Timur	0	0	0
Denpasar Barat	0	0	0
Denpasar Utara	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan, mengingat pada jenjang pendidikan ini pada umumnya lebih banyak hambatan yang terjadi antara lain seperti biaya pendidikan yang lebih tinggi. Diharapkan kondisi ini tetap dapat dipertahankan.

4.4.5 Jumlah Siswa

Seseorang dikatakan sedang/masih bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Aktif mengikuti pendidikan dimaksudkan sebagai secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian (Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan). Mereka disebutkan sebagai siswa.Sekolah adalah sekolah formal, yaitu dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pendidikan pra sekolah seperti play group dan Taman Kanak-kanak) (Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan).Berikut disajikan data jumlah siswa pada masing-masing jenjang pendidikan.

4.4.5.1 Jumlah Siswa TK

Jenjang Pendidikan formal sebelum siswa memasuki Sekolah Dasar adalah Taman Kanak-kanak. Pada jenjang pendidikan TK anak-anak ini biasanya belajar bersosialisasi dengan lingkungan di luar keluarga, diperkenalkan dengan etika moral sehingga sejak dini anak-anak telah belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dapat mengemukakan pendapat, menghargai barang dan atau orang lain. Sehingga kedepan diharapkan menjadi SDM yang berkualitas dalam hal intelektual maupun moral mereka. Berdasarkan kurikulum TK, pendidikan dan pengajaran di TK, seharusnya yang lebih ditekankan adalah pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (Id.wikipedia.org /.../Taman_kanak-kanak). Tabel berikut gambaran jumlah siswa TK di Kota Denpasar.

Tabel 4.26 Jumlah Siswa Taman Kanak – Kanak menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun ajaran 2012/2013 dan 2013/2014

Kecamatan	Tahun Ajaran	
	2012/2013	2013/2014
Den. Sel	3.884	5.432
Den. Timur	3.122	3.535
Den. Barat	6.287	4.837
Den. Utara	3.832	5.202
Jumlah	17,125	19.006

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2013/2014

Tabel diatas menjelaskan jumlah siswa Taman Kanak-kanak di Kota Denpasar pada tahun ajaran 2012/2013 tercatat sebanyak 17.125 siswa. Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah murid TK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila dilihat lebih lanjut Kecamatan Denpasar Barat mempunyai jumlah siswa terbanyak pada tahun 2012/2013, sementara pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah siswa terbanyak bergeser ke Kecamatan Denpasar Selatan.

Tabel 4.27. Jumlah Anak yang Ikut PAUD Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang Ikut PAUD		
		L	P	Jumlah
1	Denpasar Selatan	2716	2468	5184
2	Denpasar Timur	2354	2354	2331
3	Denpasar Barat	3183	3071	6254
4	Denpasar Utara	2851	2648	5499
	Jumlah	11.104	10.518	21.622

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar

Tabel di atas menggambarkan jumlah anak yang mengikuti PAUD di kota Denpasar tercatat sebanyak 21.622 anak. Secara kewilayahan, Kecamatan Denpasar Timur mencatat jumlah yang paling sedikit (10,78%) dibanding tiga kecamatan yang lain. Sedangkan Kecamatan Denpasar Barat mencatat jumlah terbesar yaitu 28,92%. Apabila dilihat dari perspektif gender, maka perbedaan jumlah terbesar antara anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti PAUD tercatat di Kecamatan Denpasar Selatan dengan perbandingan anak laki-laki 52,39% dibanding 47,6% anak perempuan. Sedangkan pada tiga kecamatan yang lain tidak terlihat perbedaan yang mencolok.

4.4.5.2 Jumlah Siswa SD

Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD), MI atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), MTs dan yang sederajat (Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan). Pada umumnya anak-anak yang berusia 7-12 tahun masuk dalam jenjang pendidikan ini. Jumlah siswa SD di Kota Denpasar tahun ajaran 2013/2014 secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4.28 Jumlah Siswa SD berdasarkan Jenis kelamin
di Kota Denpasar, Tahun 2013/2014**

Kecamatan	2013/2014		
	Negeri	Swasta	Jmh
Denpasar Selatan	17.047	2.996	21.628
Denpasar Timur	11.112	6.713	18.139
Denpasar Barat	19.094	6.941	26.347
Denpasar Utara	18.066	2.251	21.256
Jumlah	65.319	18.901	87.370

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar

Mencermati table di atas tampak bahwa jumlah siswa SD di Kota Denpasar tahun ajaran 2013/2014 tercatat sebesar 87.370 siswa yang terdiri dari 74,76% berada di sekolah dasar negeri, dan 21,64% di sekolah dasar swasta. Apabila ditelaah jumlahnya per kecamatan, maka tercatat jumlah siswa terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Barat yaitu sebesar 26.347 orang siswa atau 30,15%. Sedangkan jumlah siswa terkecil berada di Kecamatan Denpasar Timur yaitu sebesar 18.139 siswa atau 20,76%. Apabila dihubungkan dengan luas wilayah per kecamatan, wajar karena Kecamatan Denpasar Timur memiliki luas wilayah terkecil di Kota Denpasar 17,46% dari luas Kota Denpasar (Gambaran umum Kota Denpasar).

4.4.5.3 Jumlah Siswa SMP

Jenjang pendidikan SMP masih termasuk dalam kriteria pendidikan dasar (Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan). Pada jenjang pendidikan ini menampung siswa lulusan Sekolah Dasar dan sederajat. Secara rinci jumlah siswa SMP di Kota Denpasar seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29 Jumlah Siswa SMP berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar, Tahun 2012/2013 dan 2013/2014

Kecamatan	Tahun Ajaran	
	2012/2013 (orang)	2013/2014 (orang)
Denpasar Selatan	9.535	10.007
Denpasar Timur	5.941	5.930
Denpasar Barat	6.576	6.586
Denpasar Utara	13.316	12.498
Jumlah	35.368	35.021

Sumber: Profil Pendidikan, tahun 2013/2014

Tabel di atas menggambarkan jumlah siswa SMP yang tercatat di Kota Denpasar untuk tahun ajaran 2013/2014 adalah sebesar 35.021 siswa. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, namun penurunan itu tidak terlalu signifikan. Kondisi yang sebaliknya yang terjadi pada jenjang pendidikan SD maka pada jenjang pendidikan SMP terlihat Kecamatan Denpasar Utara mencatat jumlah siswa terbanyak yaitu sebesar 35,69% dari jumlah siswa yang tercatat di Kota Denpasar. Mencermati kondisi tersebut sangat dimungkinkan bahwa Kecamatan Denpasar Utara ini banyak menampung siswa lulusan Sekolah Dasar dari kecamatan-kecamatan lain yang tidak dapat terwadahi di wilayahnya. Secara kewilayahan, Kecamatan Denpasar Utara memiliki luas wilayah terbesar dibanding kecamatan yang lain.

4.4.5.4 Jumlah Siswa SMA dan SMK

Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Alyah (MA) atau yang sederajat. Jenjang pendidikan ini mewadahi siswa lulusan SMP

dan sederajat. Pada umumnya jenjang pendidikan ini mencatat jumlah siswa yang lebih kecil dibanding jumlah siswa pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Demikian juga juga yang nampak pada jumlah siswa SMA dan SMK di Kota Denpasar, secara rinci seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.30 Jumlah Siswa berdasarkan tingkat Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun 2013/2014

Kecamatan	2013/2014		
	Negeri	Swasta	Jumlah
SMA	9.955	7.613	17.568
SMK	6.504	11.049	17.553
Jumlah	16.459	18.662	35.121

Sumber: Denpasar dalam Angka 2014

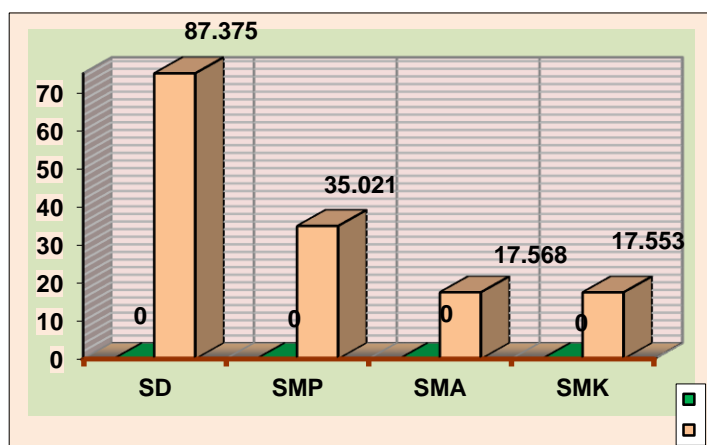
Tabel di atas menggambarkan jumlah siswa yang tercatat pada jenjang pendidikan di Kota Denpasar untuk tahun ajaran 2013/2014 adalah sebesar 35.121 siswa yang terbagi menjadi dua yaitu 17.568 siswa tertampung di SMA sedang yang tertampung di SMK sebanyak 17.553 siswa.

Apabila dilihat dari status pengelolaannya, maka 46,86% tertampung di SMA maupun SMK Negeri, sedangkan 53,14% lainnya tertampung di SMA maupun SMK swasta. Dicermati lebih lanjut, SMK swasta lebih banyak menampung siswa SMK dibanding SMK Negeri. Kondisi sebaliknya SMA Negeri lebih banyak menampung siswa dibanding SMA Negeri. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh alasan siswa yang tamat dari jenjang pendidikan SMK dapat segera bekerja karena tidak ingin melanjutkan kuliah atau menunda untuk melanjutkan kuliah. Menyikapi hal ini, para pihak terkait harus lebih memperhatikan dan mendorong SMK-SMK untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberi fasilitas sesuai dengan kebutuhan

masing-masing. Dengan demikian kualitas *out-put* SMK dapat ditingkatkan dan pada gilirannya mampu bersaing di pasaran kerja lokal, nasional, dan internasional.

Secara umum perbandingan persentase siswadari jenjang pendidikan SD – SMA/SMK seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar: 4.12 Jumlah Siswa SD- SMA/SMK di Kota Denpasar Tahun 2013 (dalam ribuan)



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2014

4. 4. 6 Siswa Melanjutkan Sekolah

Siswa melanjutkan sekolah adalah siswa yang setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berikutnya.

Kondisi ini penting untuk dinalisis/diungkapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua anak-anak yang telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu semuanya mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa faktor penyebab terhambatnya siswa tidak melanjutkan adalah (1) faktor ekonomi, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi biaya sekolah yang harus dikeluarkan, tekanan ekonomi keluarga sehingga ada kecenderungan untuk memilih alternatif sebagai pekerja (2) faktor sosial, kemampuan

siswa untuk mengikuti seleksi masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi; daya tampung sekolah yang semakin kecil pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi; persaingan yang semakin ketat; dan faktor penyebab yang lain.

Menjadi catatan penting bahwa siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terjamin kualitasnya sehingga tidak akan mengalami kesulitan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berikut ini akan diuraikan persentase siswa melanjutkan dari SD ke SMP dan siswa yang melanjutkan ke SMA. Hal ini penting diungkapkan untuk mengetahui apakah semua anak-anak yang telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu semuanya mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4.4.6.1 Siswa Melanjutkan ke SMP

Program pendidikan menjadi salah program penting pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya program dana BOS yang diberikan kepada siswa dari tingkat SD sampai jenjang pendidikan SMA untuk kelancaran pendidikan siswa. Diharapkan dengan adanya dana BOS siswa dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan tidak mengalami kendala biaya. Program ini menunjang diberlakukannya wajib belajar 9 tahun (sampai lulus SMP). Berikut tabel yang menggambarkan siswa melanjutkan ke SMP. Data untuk tahun 2014 belum dapat dihimpun.

Tabel 4.31. Angka Siswa Melanjutkan ke SMP menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012/2013 dan 2013/2014

Kecamatan	2012/2013			2013/2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Den. Selatan	114,96	125,50	119,94	43,48	40,55	42,06
Denpasar Timur	77,67	76,17	76,17	26,57	27,12	26,84
Denpasar Barat	56,18	57,20	56,69	7,57	10,44	8,99
Den. Utara	146,66	155,64	150,93	81,12	84,25	82,63
Rata-rata	97,49	100,28	98,95	38,24	38,82	38,53

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2013/2014

Tabel di atas menggambarkan untuk tahun 2013/2014 siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP untuk rata-rata kota Denpasar menunjukkan persentase angka yang sangat rendah (38,53%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2012/2013 yang besarnya mencapai 98,95% terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Untuk tahun 2013/2014 kondisi yang cukup menprihatinkan tercatat pada Kecamatan Denpasar Barat yang mencatat angka siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP hanya sebesar 8,99%. Perlu dikaji lebih jauh faktor penyebabnya, apakah banyak siswa yang melanjutkan ke wilayah lain, atau adanya faktor ekonomi yaitu keterbatasan biaya pendidikan. Mengingat dengan adanya program BOS tersebut diharapkan siswa dapat terbantu mengurangi biaya pendidikan.

Dilihat dari perspektif gender, tidak terlihat perbedaan yang besar antara siswa laki-laki dan perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, hanya berkisar antara 0,55 sampai 3,13. Kedepan diharapkan semakin banyak siswa yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan semakin lancarnya program BOS, ataupun semakin banyaknya bea siswa yang ditawarkan.

4.4.6.2 Siswa Melanjutkan ke SMA

Berbeda dengan kondisi siswa yang melanjutkan ke SMP, siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA untuk rata-rata Kota Denpasar mencapai angka di atas 50% untuk data tahun ajaran 2013/2014, walaupun terjadi penurunan dibanding tahun ajaran 2012/2013. Tabel berikut menggambarkan keadaan siswa melanjutkan ke jenjang SMA di Kota Denpasar.

Tabel 4.32. Persentase Siswa Melanjutkan ke SMA menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012/2013 dan 2013/2014

Kecamatan	2012/2013			2013/2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Den. Selatan	70,13	75,08	71.31	58,37	64,28	61,22
Denpasar Timur	30,45	39.62	32.84	25,42	23,73	24,61
Denpasar Barat	58.52	62,31	56.80	42,11	58,26	50,14
Den. Utara	70,63	77.53	72.15	61,11	63,91	62,48
Rata-rata	57,43	63,64	58,28	50,90	56,61	53,61

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

Tabel di atas menggambarkan untuk tahun 2013/2014 Kecamatan Denpasar Timur mencatat persentase jumlah siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA yang terendah (24,61%) dibanding tiga kecamatan yang lain di Kota Denpasar. Angka ini menyumbang rendahnya rata-rata siswa melanjutkan ke SMA di Kota Denpasar. Apabila dilihat data tabel di atas dibanding tahun 2012/2013, maka tahun 2013/2014 terjadi penurunan jumlah siswa laki-laki maupun perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA setelah lulus SMP. Perlu dikaji lebih jauh penyebab terjadinya.

Lebih jauh apabila dilihat dari perspektif gender, untuk tahun 2013/2014 kesenjangan tertinggi dan cukup signifikan terjadi di Kecamatan Denpasar Utara yang mencatat selisih 16,15% yang

didominasi oleh siswa perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA). Beberapa faktor penyebab kemungkinan dikarenakan siswa laki-laki di kecamatan Denpasar Utara lebih banyak yang melanjutkan ke luar daerahnya, atau penyebab lain kondisi ekonomi keluarga sehingga siswa laki-laki dituntut untuk bekerja membantu ekonomi keluarga.

4.4. 6.3 Siswa Melanjutkan ke SMK

Mencermati kondisi jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gambaran siswa yang lulus SMP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMK menunjukkan jumlah yang lebih besar dibanding siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA, Berikut adalah gambaran jumlah lulusan siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMK.

Tabel 4.33. Persentase Siswa Melanjutkan ke SMK menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2012/2013 dan 2013/2014

Kecamatan	2012/2013			2013/2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Den. Selatan	84.43	76.55	80.49	60,92	56,99	59,03
Denpasar Timur	93.32	65.45	79,39	162,50	121,26	142,67
Denpasar Barat	31.14	37.87	34.51	47,31	47,31	48,76
Den. Utara	70.76	36.76	53.76	54,49	54,49	46,22
Rata-rata	69,91	54,16	62,04	72,71	72,71	65,89

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013/2014

Table di atas menggambarkan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMK tercatat lebih banyak Apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, Kondisi ini kemungkinan disebabkan, sulitnya lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA. Sedangkan biaya pendidikan tinggi dirasakan semakin mahal, sehingga keterbatasan ekonomi menjadi

salah satu penghambat siswa untuk melanjutkan kuliah. Disisi lain pada jenjang pendidikan SMK, menawarkan minat studi-minat studi yang cukup banyak, seperti IT, Tata boga, Automotif, kelistrikan dan masih banyak minat studi yang lain, juga siswa lebih dipersiapkan untuk masuk ke pasar kerja.

Siswa lebih banyak memilih SMK, karena dengan memilih sekolah SMK mereka akan 'dicetak' untuk siap bersaing di dunia kerja sesuai dengan skill yang dimilikinya. Alasan lain karena di jenjang pendidikan SMK siswa dapat mengasah dan mengembangkan bakat serta kemampuannya di miliknya, sehingga bisa langsung siap di dunia kerja.

Dilihat secara kewilayahan untuk Kota Denpasar, untuk tahun 2013/2014 terjadi peningkatan jumlah siswa melanjutkan dibanding tahun 2012/2013, dengan peningkatan sebesar 3,85%.

Mencermati table di atas dilihat dari perspektif gender untuk tahun 2013/2014 kecuali di kecamatan Denpasar Timur, di tiga kecamatan yang lain tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMK. Ke depan yang perlu dipikirkan oleh para pengampu kebijakan dan para pendidik adalah membekali anak-anak dengan skill-skill tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dengan demikian akan dapat mengurangi pengangguran intelektual di daerah perkotaan.

4.4.7 Jumlah Sekolah

Dalam tataran pendidikan ada lima indikator mutu yang perlu diperhatikan yang meliputi mutu masukan, proses, SDM, fasilitas dan biaya (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar).. Fasilitas pendidikan yang memadai akan mendukung keberhasilan pendidikan. Fasilitas pendidikan seperti kondisi ruang kelas; fasilitas

sekolah (Perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, UKS dan fasilitas lain); juga anggaran yang disediakan bagi pendidikan.

Selama ini pemerintah sudah berusaha memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kurangnya anggaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih-lebih di kota Denpasar yang wilayahnya berada pada lingkaran Ibu kota provinsi seharusnya fasilitas pendidikan yang ada sudah memadai.

Secara formal penjenjangan pendidikan di Indonesia diawali dari Taman Kanak-Kanak, kemudian SD, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Tabel berikut menunjukkan jumlah sekolah yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 4.34 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2012/2013

	2012/2013
TK	233
PAUD	279
TPA	24
SD/Sederajat	224
SLTP/Sederajat	62
SLTA/Sederajat	33

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar

Mencermati tabel di atas, untuk tahun ajaran 2012/2013 tercatat jumlah sekolah pada jenjang pendidikan non formal yaitu PAUD adalah terbanyak yaitu sebesar 279. Apabila dihubungkan dengan jumlah anak yang mengikuti PAUD, yang tercatat jumlahnya sebesar 21.622 orang anak (11.104 anak laki-laki dan 10.518 anak perempuan), dapat gambarkan satu PAUD menampung sekitar 77 anak. Dengan asumsi satu kelas ideal terisi 20 anak, maka satu PAUD memiliki empat (4) kelas. Akan tetapi tidak semua PAUD memiliki daya tampung yang cukup besar. Sehingga masih dibutuhkan pembentukan PAUD yang tersebar di semua kecamatan maupun desa sehingga dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Tempat Penitipan Anak (TPA) yang ada di kota Denpasar tercatat sebanyak 24 buah. Dengan semakin maraknya ibu-ibu rumah tangga yang masuk ke pasar kerja, akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah TPA. Kondisi menitipkan anak di tempat pengasuhan ataupun TPA, dipicu oleh sulitnya mencari tenaga kerja sebagai pengasuh anak di rumah tangga. Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tingginya kesadaran orang tua untuk memberikan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, dan spiriitual bagi anak-anaknya sejak usia dini. Dewasa ini juga banyak terlihat sekolah PAUD yang multi fungsi yaitu sekaligus menawarkan jasa penitipan anak selama orang tuanya bekerja seperti halnya TPA, tetapi pagi hari PAUD melakukan fungsi pendidikan dini.

Jenjang pendidikan formal dari SD sampai pendidikan atas yang ada di Kota Denpasar dapat digambarkan seperti pada tabel di atas. Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sederajat mendominasi jumlah yaitu sebesar 224 buah, sedangkan jenjang SLTA dan sederajat tercatat jumlah yang paling sedikit yaitu 33 buah. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka jumlah sekolah dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi (SLTP, SLTA maupun pendidikan tinggi) dirasakan sangat kurang atau belum dapat menampung seluruh siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukan peran serta yang lebih besar dari pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang pembangunan pendidikan.

4.4.8 Kegiatan Budaya

Kegiatan budaya dapat berfungsi sebagai media yang baik untuk menyebarkan informasi faktual. Yang lebih penting lagi adalah bahwa kegiatan budaya dapat memberikan pengalaman emosional, sehingga informasi faktual dapat menjadi lebih bermakna (**Skjørten dalam www.idp-europe.org**). Kompetensi social dan emosional sering

terabaikan oleh pendidikan formal. Sebagai gambaran anak yang tidak berhasil dalam melakukan tugas tertentu atau misalnya memahami semua yang diajarkan di kelas, kadang kala merasa gagal atau mengalami perasaan tidak berharga dalam hidupnya. Untuk itu perlunya anak dibekali dengan kompetensi social dan emosional dalam proses pembelajaran, sehingga kedepan dapat menjadi anak yang tangguh dan bertanggung jawab.

Untuk menunjang aktivitas anak terkait dengan kegiatan budaya, di Kota Denpasar telah tersedia berbagai fasilitas kreatif dan rekreatif. Wadah kreatifitas anak yang ada di Kota Denpasar khususnya dalam bentuk sanggar seperti tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.35. Jumlah Fasilitas Kreatif dan Rekreatif Tahun 2013 dan 2014

Jenis Fasilitas	Jumlah	
	2013	2014
Sanggar Kegiatan Belajar	14	14
Sanggar Tabuh	105	133
Sanggar Tari	81	10
Sanggar Lukis	42	40

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2014.

Mencermati tabel di atas dapat digambarkan terjadi penurunan jumlah pada dua jenis sanggar, yaitu sanggar tari, dan lukis. Belum diketahui secara pasti faktor penyebabnya. Apakah dikarenakan menurunnya jumlah peminat, atau adanya trend remaja dewasa ini yang lebih menyenangkan berkegiatan media sosial, perlu dikaji lebih lanjut. Sehingga peran orang tua sangat diperlukan bagi kegiatan positif anak-anak di luar jam belajar di sekolah. Apabila dicermati lebih jauh jumlah Sanggar tari tercatat terbesar dibanding sanggar-sanggar yang lain, walaupun juga mengalami penurunan. Sanggar-

sanggar ini tentunya memiliki ciri khas masing-masing dimana anak-anak dapat memilih sesuai dengan bakat yang mereka miliki.

Sanggar kegiatan belajar (SKB) belum menunjukkan adanya peningkatan, walaupun mempunyai peran yang cukup penting dalam masyarakat. SKB merupakan tempat yang disediakan pemerintah sebagai sarana pendidikan dan dikategorikan sebagai Pendidikan Luar Sekolah, sehingga dilengkapi dengan sejumlah guru pamong. Secara garis besarnya SKB dengan Guru pamongnya memiliki 3 kegiatan penting, yaitu (1) Pendidikan Masyarakat seperti Kejar Paket, (2) Pembinaan Generasi Muda seperti pembinaan beragam kesenian termasuk kerajinan, jahit menjahit sesuai dengan potensi SDA dan SDM setempat, dan (3) Pembinaan Kelompok Belajar Olah Raga (KBO) yaitu pembinaan olah raga seperti bola volly, basket, pingpong, catur, dan lainnya. Semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan berlangsung di dalam maupun di luar SKB. Oleh karena itu SKB merupakan wadah yang sangat representatif untuk belajar, mengasah, dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak-anak.

Foto-foto berikut adalah gambaran dari pelaksanaan berbagai lomba kreasi budaya yang melibatkan anak-anak Kota Denpasar. Foto 4.1 dan 4.2 adalah pentas budaya anak-anak Kota Denpasar,

Gambar: 4.13 Pentas Budaya Anak-anak Kota Denpasar.



Sumber: <https://www.google.com/>



Sumber: <https://www.google.com/>

Selain lomba-lomba untuk pengembangan bakat nari maupun modeling, lomba lain yang sering dilaksanakan adalah lomba kreasi budaya untuk pengembangan budaya Bali. Hal ini dapat dilihat dari beberapa foto berikut ini.

Foto: 4.14 Aktivitas anak-anak dalam pengembangan budaya Bali di Kota Denpasar.



Sumber: <https://www.google.com/>

Foto: 4.15 Lomba pakaian adat Bali Anak-anak Kota Denpasar



Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar-gambar di atas mencerminkan semangat pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan kota yang berwawasan budaya dan mendukung Kota Layak Anak (KLA).

4. 5 Upaya Perlindungan Khusus

Perlindungan Khusus merupakan salah satu klaster yang termuat dalam kerangka Konvensi Hak Anak yang memuat Hak Anak. Dalam klaster ini antara lain menjelaskan bagaimana upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu "Memastikan bahwa ABH mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar" (Meneg P3A RI).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus untuk anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak terlantar, anak korban trafficking dan anak bermasalah lainnya.

4.5.1 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Kerangka Konvensi Hak Anak memuat salah satu dari lima klaster yaitu perlindungan khusus yang merupakan hak anak. Perlindungan khusus diberikan diberikan antara lain bagi anak-anak yang mengalami kekurangan baik secara fisik ataupun mental. Mereka ini antara lain adalah anak-anak autis atau anak yang *down sindroom*. Oleh karenanya dibutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak terkait sehingga anak-anak tersebut mendapatkan tempat untuk berlindung dan mendapat perlakuan khusus. Berikut adalah foto kegiatan yang diadakan oleh PTKABK Denpasar.

Gambar: 4.16 Bapak Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar menyerahkan Hadiah kepada Anak-anak berkebutuhan khusus pemenang lomba dalam rangka HUT Kota Denpasar



<https://www.google.com>

Gambar: 4.17. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar berdialog dengan Anak Berkebutuhan Khusus.



<https://www.google.com>

Gambar.4.18 Anak-anak Berkebutuhan Khusus latihan kemandirian



<https://www.google.com>

Terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perlindungan, banyak permasalahan hidup yang menyebabkan kesengsaraan bagi anak-anak. Sebagai contoh kondisi-kondisi berikut, seperti kedua orang tua yang seharusnya melindungi dan membimbing anak-anak mereka tetapi terpaksa harus bekerja, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang perhatian terhadap perkembangan anak. Atau munculnya persoalan yang disebabkan karena kurangnya rasa empati orang-orang dewasa yang seharusnya memikirkan masa depan anak-anak, bahkan merusak masa depan anak-anak. Tabel berikut menunjukkan jenis persoalan dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Tabel 4.36 Jumlah Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus Tahun 2014

Kategori	Jumlah Anak yang dilaporkan		
	L	P	Juml
Anak dalam Situasi Darurat	2	2	4
Anak yg berhadapan dgn hukum (khusus anak korban dan anak saksi)	13	1	14
Anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual	0	2	2
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alcohol,psikotropika dan zat adiktif lain	1	0	1
Anak dengan HIV-AIDS	36	29	65
Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan	0	9	9
Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis	1	2	3
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	2	0	2
Anak korban eksploitasi seksual	0	2	2

Sumber: KBPP Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan jumlah terbesar kasus yang disandang anak-anak adalah anak dengan HIV-AID yaitu 65 anak yang didominasi oleh anak laki-laki sebesar 55,38%. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini menggambarkan betapa maraknya kehidupan seksual bebas anak dan atau remaja yang tidak bertanggung jawab, sehingga berakibat pada banyaknya anak penyandang HIV AID, atau kemungkinan mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang tua penyandang HIV-AID, tidak ada data tercatat untuk umur mereka. Atau juga adanya faktor pola asuh orang tua juga berpengaruh terhadap perbuatan seperti kejahatan terhadap pelanggaran ketertiban umum, kejahatan kesusilaan, penganiayaan, dan perbuatan negatif yang lain. Seberapa kecilnya jumlah kasus yang ada, kedepan diharapkan tidak terjadi lagi. Perlu adanya perhatian yang lebih serius dari orang tua, masyarakat sekitar, sekolah, dan instansi-instansi yang terkait menangani dapat mencegah serta menangani kasus dengan baik (apabila terpaksa masih terjadi kasus). Sehingga anak-anak dapat

tumbuh kembang dengan baik, hidup aman dan nyaman, terlindungi sebagaimana hak yang seharusnya mereka dapatkan, di lingkungan mereka.

Apabila dicermati lebih lanjut, data untuk anak yang berhadapan dengan hukum (khusus anak sebagai korban dan anak sebagai saksi) menunjukkan jumlah yang cukup besar yaitu 14 anak yang didominasi oleh anak laki-laki sebanyak 93% sedangkan sisanya 7% adalah anak perempuan. Data ini tidak terinci berapa kasus/anak sebagai korban atau berapa anak sebagai pelaku. Sejak lama pula telah dikenal institusi-institusi tertentu untuk mengadili dan menghukum orang-orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma hukum. Status terpidana (terhukum) tidak dimonopoli oleh kelompok usia tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak dapat saja berbuat kejahatan dan kemudian dihukum atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum positif yang kini berlaku di Indonesia, seseorang baru dapat dianggap bersalah karena melakukan suatu tindak kejahatan apabila sudah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai hal itu. Sebelum adanya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang telah ditangkap kemudian ditahan oleh polisi karena diduga melakukan suatu kejahatan belum dapat dinyatakan bersalah. Itulah yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Orang yang telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi hukum oleh hakim disebut terpidana.

Kategori/kasus yang cukup besar lainnya adalah Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang kesemuanya berjenis kelamin perempuan. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya. Banyak hal yang diduga sebagai penyebab mengapa anak-anak perempuan lebih banyak sebagai korban tindak kekerasan, yaitu fisiknya lebih lemah, lebih penurut atau kurang berani melawan. Untuk ini sudah sewajarnya harus mendapat perhatian serius dari para pihak terkait.

Kasus-kasus lain yang tercatat pada table di atas menunjukkan jenis-jenis kasus seperti Anak dalam Situasi Darurat, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban eksploitasi ekonomi/seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alcohol,psikotropika dan zat adiktif lain, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dengan jumlah kasus/anak berkisar 1 sampai 4 anak/kasus. Ada 4 (empat) kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Pelaku kekerasan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tua, namun kenyataannya anak-anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan. Anak-anak korban kekerasan ini diharapkan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kekerasan yang dialami dan sekaligus dapat menuntaskan permasalahannya. Artinya, dengan layanan yang diterimanya anak-anak korban kekerasan tidak menjadi terpuruk, tidak trauma, namun dapat dipulihkan (fisik dan mental) sehingga mereka dapat menatap masa depannya kembali secara normal.

Hal lainnya yang juga sangat penting untuk diketahui adalah apakah anak-anak yang menjadi korban kekerasan ada yang sampai mengalami cacat (fisik dan atau mental), tidak bisa/mau melanjutkan sekolah yang menyebabkan mereka akhirnya tidak dapat menatap masa depannya dengan baik. Ada tiga lembaga atau cara penanganan, yaitu melalui pendampingan oleh lembaga P2TP2A, secara medis (dokter dan rumah sakit), dan hukum.(dari kepolisian). Penanganan seperti ini tentu saja disesuaikan dengan sifat kekerasan yang menimpa anak-anak. Untuk memudahkan penyusunan strategi penanggulangan dan atau pencegahannya maka perlu diketahui lebih dalam siapakah pelaku kekerasan, mengapa mereka sampai melakukan tindak kekerasan terhadap anak, kekerasan seperti apa yang dialami oleh anak-anak serta di mana mereka menerima tindak kekerasan.

Kota Denpasar belum memiliki lembaga pemasyarakatan yang khusus untuk anak. Demikian juga krisis center yang khusus diperuntukkan untuk anak yang bermasalah dengan hukum masih belum tersedia.

4.5.3 Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak dengan kategori berkebutuhan khusus mengalami gangguan perilaku, gangguan kesehatan dan kesulitan belajar, mereka disebut tunadaksa, tunalaras, tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan potensi ABK masing-masing. Oleh karena demikian, bagi ABK dibutuhkan bentuk dan tempat pelayanan pendidikan khusus. Sebagai contoh anak tunarungu dibutuhkan kemampuan memiliki bahasa isyarat, atau alat bantu pendengaran.

Kota Denpasar sudah mempunyai lembaga pendidikan untuk menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (PTKABK). Selain menampung anak-anak berkebutuhan khusus, lembaga ini memberikan terapi serta mendidik mereka melalui berbagai kegiatan seperti diadakannya lomba olah raga dan kreativitas. Lembaga ini lebih menghususkan pada penanganan anak-anak penyandang autis. Berikut table yang menggambarkan jumlah anak berkebutuhan khusus di PTKABK di Kota Denpasar.

Tabel 4.37 Data Anak Berkebutuhan Khusus di PTKABK Kota Kota Denpasar 2014

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Anak yg mengikuti program di PTKABK (Terapi dan Kelas)	69	26	95
Total	69	26	95

Sumber :Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus, 2014

Tabel di atas menunjukkan jumlah anak yang mengikuti program di PTKABK yaitu sebesar 95 anak. Apabila dilihat dari perspektif gender, terlihat kesenjangan yang besar antara peserta program laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan 72,6% anak laki-laki dibanding 27,4% anak perempuan. Belum diketahui penyebab terjadinya, apakah anak laki-laki yang menyandang keterbatasan fisik/mental lebih banyak ataukah alasan lain seperti kurangnya perhatian para orang tua yang mempunyai anak perempuan yang menyandang/berkebutuhan khusus untuk mengikutkan anaknya pada program terapi maupun kelas di PTKABK.

Mencermati kondisi anak yang demikian, maka tugas keluarga yang memiliki anak dengan kekurangan fisik, instansi yang terkait dengan penanganan, ataupun lembaga-lembaga suasta yang bergerak di bidang yang terkait dengan kondisi ini perlu memberikan perhatian lebih lanjut, sehingga diharapkan anak-anak dengan kondisi memiliki kemampuan berbeda ini akan tetap memiliki masa depan seperti anak-anak normal yang lain. Perlu adanya perhatian dari pemerintah kota untuk menambah fasilitas bagi mereka, sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah khusus seperti Sekolah luar biasa (SLUB).

4.5.4 Panti Asuhan

Dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terlantar, tidak memiliki keluarga,kekurangan fisik, maupun yang bermasalah dengan hukum, ada lembaga yang menangani seperti Panti asuhan.

Panti asuhan pada dasarnya berfungsi untuk mengasuh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti: karena ditelantarkan orang tuanya, karena cacat, atau karena sesuatu hal menyebabkan mereka tidak mampu untuk hidup layak secara normal, dan lain-lain. Ada panti asuhan yang bertujuan untuk merawat, mengasuh, membimbing, dan membesarkan anak-anak secara penuh. Artinya, panti asuhan memiliki tanggung jawab penuh akan kebutuhan dan keberlangsungan hidup anak-anak asuhnya. Selain itu ada pula panti asuhan yang memiliki tanggung jawab segmental dalam bidang tertentu saja.Panti asuhan semacam ini misalnya menangani anak-anak yang menyandang cacat fisik misalnya tuna wicara, tuna netra.

Berikut tabel yang menggambarkan sejumlah panti asuhan dan daya tampung yang dimiliki panti-panti asuhan tersebut.

Tabel 4.38 Nama dan Daya tampung Panti Asuhan di Kota Denpasar, Tahun 2014

No	Nama Panti asuhan	Jumlah Anak	Alamat Panti
1.	PA Widya Asih	37	Jln Raya Sesetan Gg.Camar No. 1 A Dps
2	PA. Anugrah (Putri) Bala Keselamatan	41	Jln.Cokroaminoto No.34 Denpasar
3	PA Putra William Booth Bala Keselamatan	62	Jln. Keboiwo No. 28 Br.Liligundi Ubung Kaja Denpasar
4	PA Elisama	80	Jln. Batas Gg.Dara 2 Denpasar
5	PA Eben Haezer	30	Jln.Palapa IV/D2 Denpasar
6	PA Pendidikan KH.M.Mannshur Putra	30	Jln.Tukad Pule 7 a Denpasar

7	PA Pendidikan KH.M.Mannshur Putri	30	Jln.Pendidikan II/4 Denpasar (Br.Graha Santi)
8	PA Tunas Bangsa	100	Jln.Gunung Seraya IV/204/BIV Perumnas Monang Maning
9	PA AL Islam	56	Jln.Pemogan 178 Denpasar
10	PA. Tat Twam Asi	46	Jln.Raya Giri IX Renon Denpasar
11	PA Dharma Jati II	213	Jln.Trengguli No. 80 Penatih Denpasar
12	PA Sunya Giri	30	Jln.Tunjung Sari No.23 Padang Sambian Denpasar
13	PSTW Wana Seraya	50	Jln.Gumitir No.66 Kesiman Kertalangu Denpasar
14	Panti Guna Kerta Wiweka	20	Jln.Ahmad Yani (Lumintang) Denpasar
15	Panti Guna Dria Raba	38	Jln. Serma Gede 11 Denpasar
16	Panti Asuhan Kasih Peduli Anak	27	Jln.Gn. Payung 23 Br. Umadui Padang Sambian
	Jumlah	890	

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar

Tabel di atas menggambarkan sebanyak 16 Panti Asuhan yang tercatat di Kota Denpasar, yang keseluruhan dapat menampung 890 anak. Tercatat 3 Panti asuhan besar PA Dharma Jati II, PA Tunas Bangsa, dan PA Elisama, yang dapat menampung anak sebanyak lebih dari 80 anak. Data yang tercatat pada Tabel di atas belum terpilah menurut jenis kelamin, sehingga tidak dapat diketahui apakah anak laki-laki ataukah perempuan yang lebih banyak menghuni panti asuhan. Sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah anak laki-laki ataukah anak perempuan yang lebih banyak terlantar atau tidak memiliki keluarga.

Semakin banyaknya anak-anak yang memerlukan lembaga ini maka secara otomatis diperlukan penambahan panti asuhan. Persoalannya dalam hal ini bukanlah terletak pada kapasitas daya tampung Panti Asuhan yang tersedia, namun lebih kepada mengapa

masih banyak anak yang harus tinggal di panti asuhan. Bebearapa faktor penyebab mengapa anak tidak dalam asuhan orang tuanya, kemungkinan disebabkan antara lain karena anak lahir di luar kehendak orang tua, atau faktor ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan pengasuhan.

4.2.2 Anak Terlantar

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang sudah menjadi UU No. 35/2014 mengamanatkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus antara untuk anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak yang tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tuanya termasuk mereka tidak mengenyam pendidikan yang seharusnya menjadi haknya dapat dikategorikan sebagai anak terlantar (KNPP 2002; 10).

Daerah perkotaan pada umumnya menjadi tujan mobilitas penduduk antara lain untuk tujuan ekonomi, yaitu mencari pekerjaan. Tidak terkecuali Kota Denpasar, sehingga mesyarakatnya sangat heterogen. Di beberapa tempat masih dijumpai kantong-kantong kemiskinan, dimana masih banyak ditemukan anak-anak terlantar.

Di Kota Denpasar tahun 2012 dan 2013 masih tercatat anak terlantar di empat kecamatan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Data tahun 2014 belum dapat dihimpun.

Tabel: 4.39 Penduduk Usia 5 - 18 Tahun Menurut Kecamatan dan Kategori Terlantar Kota Denpasar Tahun 2012-2013

Kecamatn	Terlantar	
	2012	2013
Denbar	198	191
Densel	602	507
Dentim	283	280
Denut	369	361
Jumlah	1.452	1.339

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2014

Mencermati table di atas tampak bahwa terlihat untuk tahun 2012 maupun 2013 Kecamatan Denpasar Selatan mencatat jumlah anak terlantar terbesar dibanding tiga kecamatan yang lain. Perlu dikaji lebih jauh apa yang menyebabkan banyak ada anak terlantar di Kecamatan Denpasar Selatan ini. Sedangkan jumlah terkecil berada di Kecamatan Denpasar Barat. Dicermati lebih jauh, tahun 2013 tercatat adanya sedikit penurunan jumlah anak terlantar pada ke empat kecamatan. Secara total Kota Denpasar penurunannya sebesar 7,78%. Kedepan diharapkan akan semakin dapat diminimalisir jumlahnya.

4.5.6 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Kota Denpasar merupakan pusat perekonomian, dan pemerintahan. Sehingga bukan rahasia umum lagi Kota Denpasar menjadi tujuan penduduk yang mengadakan mobilitas untuk tujuan ekonomi, pendidikan, maupun pusat kegiatan perbelanjaan dan perdagangan. Kota Denpasar juga tidak luput dari masuknya/munculnya gepeng yang berkeliaran mengais rejeki dari kebaikan hati orang. Ditengarai mereka bukanlah penduduk Denpasar tetapi mereka berasal dari luar kota seperti dari Karangasem (Muntigunung/Pedahan), Bangli (Trunyan) dan dari Jawa hanya saja mereka beroperasi di wilayah Kota Denpasar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya seperti penangkapan namun mereka ini tidak pernah jera. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya, akhirnya mereka akan kembali lagi gentayangan di tempat-tempat yang dianggapnya strategis untuk menengadahkan tangan seperti di traffick light, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Tabel berikut menggambarkan jumlah gepeng yang telah dibina di Kota Denpasar

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu fenomena sosial terutama di perkotaan yang belum pernah bisa diatasi secara tuntas. Persoalan gepeng bukanlah kemiskinan

belaka, melainkan juga eksploitasi, manipulasi dan tidak konsistennya cara-cara pertolongan bagi mereka, baik oleh mereka sendiri maupun pihak lain yang menaruh perhatian pada persoalan gepeng.

Tabel berikut menggambarkan jumlah gepeng yang telah dibina di Kota Denpasar

Tabel 4.40 Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang Telah Dibina di Kota Denpasar, 2013 dan 2014

Kelompok Umur (tahun)	2013			2014		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh
0 - 4 tahun	14	31	45	15	2	17
5 - 9 tahun	8	8	16	0	3	3
10 - 14 tahun	1	2	3	0	1	1
15 - 18 tahun	0	1	1	0	2	2
19 tahun ke atas	23	107	230	11	39	50
Jumlah	46	149	296	26	47	73

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2014

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan jumlah gepeng yang telah dibina di Kota Denpasar dari tahun 2013 ke tahun 2014. Kondisi ini cukup menggembirakan karena mengindikasikan penurunan jumlah gepeng yang beroperasi. Hal ini menunjukkan cukup berhasilnya kota Denpasar dalam mengurangi jumlah gepeng yang beroperasi. Gepeng dengan usia 0-4 tahun usia 19 tahun keatas tercatat jumlah yang cukup besar walaupun telah mengalami penurunan jumlah untuk tahun 2014. Kedepan diharapkan bisa diturunkan lagi jumlahnya, bahkan diharapkan tidak ada lagi gepeng yang masih beroperasi.

Dilihat dari perspektif gender, tercatat gepeng perempuan jauh lebih banyak jumlahnya dibanding gepeng laki-laki baik pada kelompok umur 0-4 tahun maupun pada kelompok umur di atas 19 tahun. Kemungkinan faktor penyebab hal ini adalah dari sisi ekonomi, kurangnya kesempatan kerja,

atau dari sisi social gepeng perempuan lebih luwes dengan menggendong balita agar lebih dikasihani untuk mendapatkan uang sedekah.

Mengingat Kota Denpasar merupakan kota tujuan wisata dimana banyak wisatawan domestik, maupun manca negara yang datang, maka Kota Denpasar diharapkan bersih dan aman. Untuk mengurangi keberadaan gepang di Kota Denpasar perlu dilakukan upaya yang lebih keras untuk membuat mereka jera.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan.

- Kepemilikan akta kelahiran masih perlu ditingkatkan, tercatat 191.478 anak yang sudah memiliki akta kelahiran atau sebesar 67% dari jumlah anak sampai dengan usia 19 tahun di Kota Denpasar.
- Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak akan sarana bacaan, di Kota Denpasar sudah tersedia perpustakaan yang cukup memadai baik yang ada di setiap satuan pendidikan maupun di luar sekolah.
- Untuk menyalurkan aspirasi anak-anak yang ada di Kota Denpasar telah dibentuk forum anak di tingkat kota dan sekaa taruna yang ada di tingkat banjar.
- Jumlah Kelompok bermain/TK di Kota Denpasar sudah tersedia di setiap kecamatan, dan yang terbanyak berada di kecamatan Denpasar Barat yaitu sebesar 29% dari jumlah yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2013. Tercatat 1 buah TK Negeri di Kecamatan Denpasar Utara.

2. Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Masih ada penduduk yang menikah pada usia di bawah 18 tahun yang nota bene usia ini masih tergolong usia anak-anak.

3. Lembaga Bina Keluarga Balita yang ada di Kota Denpasar sudah memberikan manfaat yang besar bagi tumbuh kembang anak karena melalui lembaga ini anak-anak balita dapat dimonitor tumbuh kembangnya.

4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Angka kelahiran di Kota Denpasar tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun 2012, sementara angka kematian bayi dan balita tahun 2014 mencapai 38 orang

(termasuk kematian neonatal), meningkat dari tahun 2013, yang jumlahnya sebanyak 22 bayi dan balita

- Terjadi peningkatan persentase cakupan ASI eksklusif di semua kecamatan di Kota Denpasar dari tahun 2013 ke tahun 2014, dengan cakupan ASI sudah di atas 67%. Sementara itu Prevalensi Balita dengan status gizi lebih 153 anak, sebanyak 122 anak berstatus gizi kurang, sedangkan 30 anak dengan berstatus gizi buruk.
- Pojok ASI telah tersedia di tempat-tempat umum baik di instansi pemerintah maupun swasta. Seperti di pusat perbelanjaan, bandara, pasar tradisional, dan di terminal Ubung.
- Semua bayi di kota Denpasar sudah mendapatkan kelima imunisasi dasar. Untuk sarana pelayanan kesehatan reproduksi dan mental juga sudah mengalami peningkatan.

5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Secara umum APK di jenjang pendidikan SD-SMA di Kota Denpasar tahun 2012/2013 mencapai angka di atas 100%, sementara APM SD-SMA masih belum mencapai 100% akan tetapi sudah mencapai di atas persentase 70%.
- Pada jenjang pendidikan SMP tidak terdapat siswa mengulang kelas, sedang pada jenjang pendidikan SD siswa mengulang kelas sebanyak 34 siswa, dan siswa mengulang kelas di SMA masih cukup tinggi yakni sebanyak 114 siswa.
- Masih tercatat siswa putus sekolah SD/MI sebanyak 9 siswa sedangkan siswa SMP/MTs sebanyak 13 siswa. Tidak terdapat siswa putus sekolah di jenjang pendidikan SMA/MA.
- Siswa melanjutkan sekolah dari SD ke SMP mencapai angka 38%, sementara dari SMP ke SMA mencapai 53%, dan dari SMP ke SMK mencapai 65%.

- Ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif untuk menunjang kreatifitas anak-anak yang ada di Kota Denpasar sudah relative memadai, walaupun jumlah sanggar tari, sanggar tabuh dan lukis mengalami sedikit penurunan jumlah untuk tahun 2014.

5. Upaya Perlindungan Khusus

- Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Denpasar untuk tahun 2014 terbesar adalah jumlah Anak dengan HIV-AIDS (65 anak), juga Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH- korban dan saksi) sebanyak 14 anak, sedangkan Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan tercatat 9 anak. Sementara jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Denpasar pada tahun 2014 berjumlah 95 anak orang (Terapi dan kelas).
- Untuk tahun 2014 tercatat sebanyak 73 orang Gepeng yang didominasi oleh kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 19 tahun ke atas.

5.2 Rekomendasi

- Sampai saat ini masih perlu dilakukan upaya program percepatan pencatatan akte kelahiran karena dari data yang tercatat diperkirakan masih ada penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui gebyar maupun jemput bola secara berkesinambungan
- Untuk mengatasi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini perlu dilakukan sosialisasi tentang resiko dari pernikahan di bawah umur dengan sasaran para remaja yang ada di Kota Denpasar.
- Sebagai upaya menanggulangi kasus-kasus yang menimpa anak-anak yang memerlukan Perlindungan khusus, dikarenakan

baik kasus kriminalitas maupun kasus KDRT di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, serta menekan bertambahnya anak terlantar perlu dilakukan sosialisasi UU.No.23/2002 tentang Perlindungan anak secara berkesinambungan.

- Untuk meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar, maka perlu dilaksanakan program penyadaran para ibu akan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, dan memperbanyak penyediaan pojok ASI di tempat yang memerlukannya.
- Pencegahan terhadap anak-anak yang putus sekolah masih perlu dilakukan sehingga di Kota Denpasar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah di semua jenjang pendidikan.
- Pencegahan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga Kota Denpasar bisa bebas dari wajah-wajah gelandangan dan pengemis.

PUSTAKA

<http://www.kla.or.id>

Laurike, dkk, dalam Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI

Pancho Kaslam dalam <http://www.bbc.co.uk>

<http://www.bbc.co.uk>

<http://m.detik.com/news>, diakses tgl 18 Juli 2013).

www.organisasi.org - Kesehatan, diakses tanggal 19 Juli 2013

www.imunisasi.net

p2ppaluta.blogspot.com/jadwal-vaksin, diakses tanggal 19 Juli 2013

Sri Widowati Sugih Hastuti, Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Perekonomian Rakyat (Pusat P3R, Bogor). Artikel - Th. I - No. 11 -
Januari 2003

Skjørten, Miriam Donath dalam www.idp-europe.org